



**RENSTRA
PERUBAHAN
KEDUA**

2021 - 2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan baik.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Pasal 92 ayat (2) bahwa Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD. Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk periode 5 (lima) tahun.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar ini maka selanjutnya harus menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tersebut ke dalam sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar diharapkan dapat mensukseskan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

Martapura, Februari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar,


ANNA ROSIDA SANTI, ST., MT
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19741024 199803 2 006

DAFTAR ISI

COVER BUKU	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
I.I Latar Belakang.....	1
I.II Landasan Hukum.....	3
I.III Maksud dan Tujuan.....	6
I.IV Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
II.I Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
II.II Sumber Daya.....	17
II.III Kinerja Pelayanan.....	
222	
II.IV Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
III.I Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan....	40
III.II Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah.....	46
a. Maju	46
b. Mandiri.....	46
c. Agamis	47
Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, Dan Agamis	50
III.III Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	57
III.IV Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	69

III.V	Penentuan Isu-Isu Strategis	80
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
IV.I	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	84
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
V.I	Perumusan Strategi	89
V.II	Evaluasi Penentuan Langkah Strategis	93
V.III	Strategi Mengatasi Kendala.....	96
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN		
VI.I	Pengantar	99
VI.II	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif	99
	Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar	183
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
VII.I	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	190
BAB VIII PENUTUP		
		198

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan...	18
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	18
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Esselon dan Staf.....	19
Tabel 2.5 Jumlah Perlengkapan	19
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar	24
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar	32
Tabel 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	50
Tabel 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD	58
Tabel 3.3 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Terkait Fungsi dan Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar	69
Tabel 3.4 Telaahan Renstra KLHS Terkait Fungsi dan Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar	73
Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	80
Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria	81
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	88
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan.....	90
Tabel 5.2 Analisa Lingkungan	94
Tabel 5.3 Komparasi Urgensi Faktor Internal	95
Tabel 5.4 Komparasi Urgensi Faktor Eksternal.....	95
Tabel 5.5 Formulasi Strategi SWOT.....	97
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan	100
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	193
Tabel 8.1 Matrik Pedoman Transisi Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar	200

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tugas dan Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar	12
---	----

B A B

Perubahan Rencana Strategis

Kabupaten Banjar

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Perda No. 4 Tahun 2013) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 5 Tahun 2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Banjar yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2021. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN), pada pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa “Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD”. Selajutnya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1, 2 dan 3), maka Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016-2021 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari beberapa indikator,

namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti terutama di dalam menghadapi tantangan daerah pada periode berikutnya.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjar. Renstra ini memberikan gambaran tentang arah perkembangan pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2021-2026. Selain itu dalam laporan ini juga dijelaskan gambaran tentang arah perkembangan pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, dan Pertanahan.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*.

I.II LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/ PRT/ M/ 2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

25. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57).

I.III MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan dinas pada periode tahun 2021-2026 serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Banjar.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar meliputi uraian tentang amanat Undang-undang, tugas, fungsi dan kewenangan serta peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, kondisi dan tantangan serta isu strategis di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan dan target capaian yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator output, outcome dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran penyusunan Rencana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Kedudukan dan peranan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam perencanaan daerah sangat penting. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar harus menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2021-2026, agar dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan nanti dapat mengacu kepada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan banyak berkaitan dengan pihak lain, apabila tidak disusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar tentunya akan simpang siur, terlebih dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Banjar.

I.IV SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar ini, secara berurutan meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**, berisikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**, berisikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, berisikan Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan yang Dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Periode 2021-2026.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, berisikan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar 2021-2026.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, berisikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**, berisikan ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh SKPD.

B A B

Perubahan Rencana Strategis

2

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian

Kabupaten Banjar

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang terdiri dari 6 (enam) bidang yang mempunyai kegiatan wajib yaitu bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air, bidang Cipta Karya, bidang Bina Jasa Konstruksi, bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, dan pertanahan. Selain itu juga terdapat 1 (satu) bagian yakni bagian Sekretariat yang menangani operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang terkait penyelenggaraan jalan, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, pengelolaan sumber daya air (SDA), pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, pengelolaan izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pengelolaan

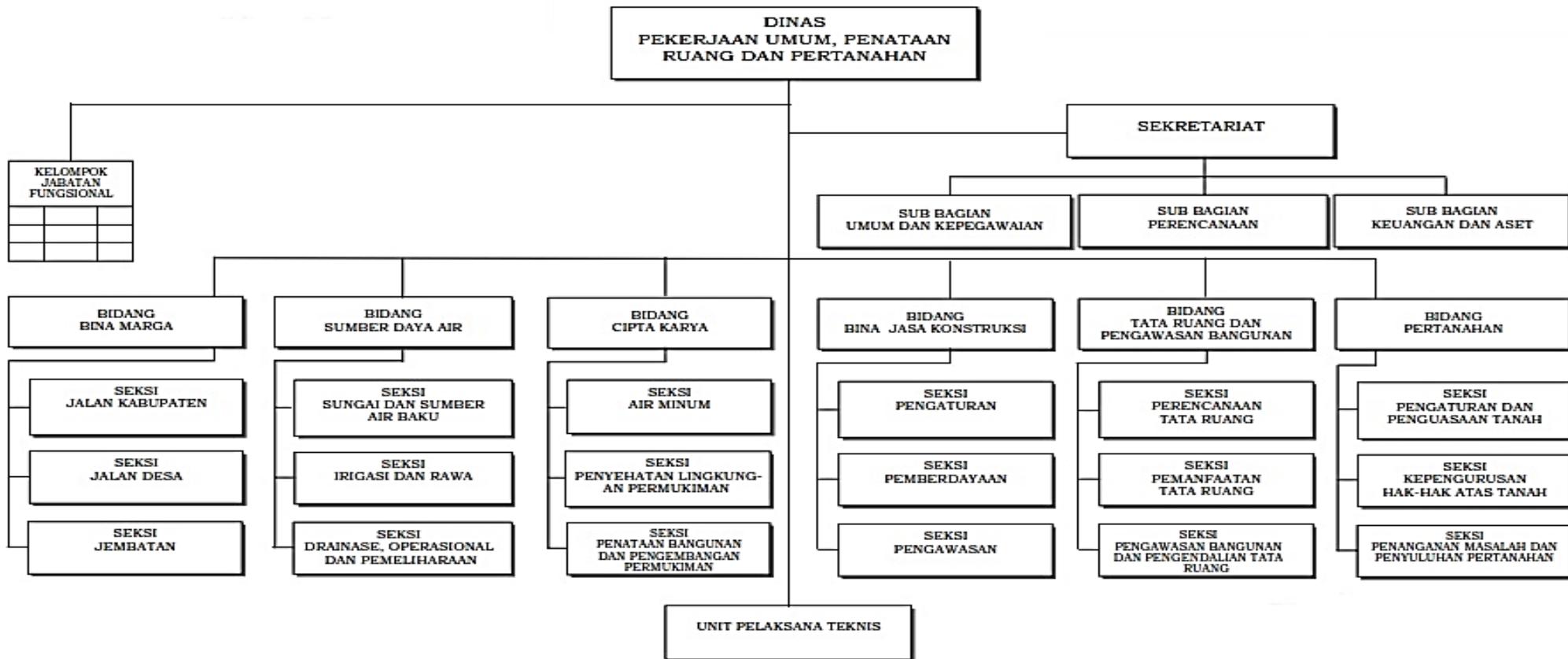
- izin membuka tanah, penatagunaan tanah, dan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang terkait penyelenggaraan jalan, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, pengelolaan sumber daya air (SDA), pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, pengelolaan izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pengelolaan izin membuka tanah, penatagunaan tanah, dan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan jalan, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, pengelolaan sumber daya air (SDA), pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, pengelolaan izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pengelolaan izin membuka tanah, penatagunaan tanah, dan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan administrasi DPUPRP;
 5. Pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DPUPRP, dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut di atas, maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi Jalan Kabupaten;
 - b. Seksi Jalan Desa;
 - c. Seksi Jembatan.
4. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Seksi Sungai dan Sumber Air Baku;
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
 - c. Seksi Drainase, Operasional dan Pemeliharaan.
5. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - a. Seksi Air Minum;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
6. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaturan;
 - b. Seksi Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
7. Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang.
8. Bidang Pertanahan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah;
 - b. Seksi Kepengurusan Hak-Hak atas Tanah; dan
 - c. Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
10. Kelompok Jabatan Fungsional.





Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tugas dan Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Banjar

Adapun tugas dan fungsi Bidang-bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar meliputi :

1. Sekretariat mempunyai tugas menyusun, memonitor, menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan aset, serta umum dan kepegawiaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - b. Penyelenggaraan urusan keuangan dan aset, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, dan kehumasan serta kepegawiaan di lingkungan dinas; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang jalan Kabupaten, jalan desa dan jembatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan
 - b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
 - e. Penyelenggaraan teknis urusan jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang sungai, sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang sungai, air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;

- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang sungai, sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan di bidang sungai, sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;
 - d. Penyelenggaraan teknis pengelolaan di bidang sungai, sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;
 - e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan sungai, sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Untuk menyelenggarakan tugas :
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di kegiatan pengembangan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;

- d. Pembinaan teknis dan supervise di kegiatan pengembangan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang bina jasa konstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang Bina Jasa Konstruksi;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang Bina Jasa Konstruksi;
 - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Bina Jasa Konstruksi;
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Bina Jasa Konstruksi;
 - e. Penyelenggaraan teknis urusan Bina Jasa Konstruksi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang, Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang;

- c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - e. Penyelenggaraan teknis urusan perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas bidang pertanahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang Pertanahan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang Pertanahan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Pertanahan;
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang Pertanahan;
 - e. Penyelenggaraan teknis urusan Pertanahan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yaitu:
- a. Melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
 - b. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
 - c. Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
 - d. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II.II SUMBER DAYA

Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	0
2	S2	7
3	S1	31
4	D4, D3,D2	9
5	SLTA	13
6	SLTP	2
7	SD	1
Jumlah		63

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurusan

No	Pelatihan Penjurusan	Jumlah
1	ADUM/PIM IV	12
2	SPAMA/PIM III	2
3	SPAMEN/PIM II	0
4	TMPP	1
5	PRAJABATAN	2
6	PEMEGANG KAS	1
7	PELATIHAN PENDAMPINGAN	1
8	PELATIHAN DASAR CPNS	4
Jumlah		23

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	1
2	II	4
3	III	53
4	IV	5
Jumlah		63

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Esselon dan Staf

Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang Menduduki Esselon dan Staf

No	Golongan	Jumlah
1	Esselon II	1
2	Esselon III	7
3	Esselon IV	19
4	Fungsional	4
5	Staf	32
Jumlah		63

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

5. Perlengkapan dan Peralatan

Perlengkapan dan peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Alat Berat	25 Unit	Baik
2	Asphalt Cutter	1 Unit	Baik
3	Stamper	1 Unit	Baik
4	Vibrating Hammer	1 Unit	Baik
5	Jack Hammer	1 Unit	Baik
6	Compressor	1 Unit	Baik
7	Generator	1 Unit	Baik
8	Genset	2 Unit	Baik
9	Portable Water Pump	2 Unit	Baik
10	Mobil Operasional	23 Unit	Baik
11	Sepeda Motor Operasional Roda 2	43 Unit	Baik
12	Sepeda Motor Operasional Roda 3	1 Unit	Baik
13	Klotok	1 Unit	Baik

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
14	Mesin Ketik Manual Portable	10 Unit	Baik
15	Mesin Ketik Listrik	4 Unit	Baik
16	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	16 Unit	Baik
17	Mesin Penghitung Uang	1 Unit	Baik
18	Lemari Besi	28 Unit	Baik
19	Lemari Kayu	30 Unit	Baik
20	Rak Besi	8 Unit	Baik
21	Rak Kayu	40 Unit	Baik
22	Filling Cabinet	36 Unit	Baik
23	Brankas	5 Unit	Baik
24	Kointainer Box Plastik	10 Unit	Baik
25	Lemari Kaca	3 Unit	Baik
26	Lemari Makan	1 Unit	Baik
27	CCTV	4 Unit	Baik
28	Penghancur Kertas	3 Unit	Baik
29	Mesin Absen	4 Unit	Baik
30	LCD Proyektor	4 Unit	Baik
31	Layar LCD Projector	1 Unit	Baik
32	Papan Nama Instansi	2 Unit	Baik
33	Meja Kerja Kayu	17 Unit	Baik
34	Meja Besi	2 Unit	Baik
35	Meja Rapat	37 Unit	Baik
36	Meja Telepon	2 Unit	Baik
37	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
38	Meja Tambahan	4 Unit	Baik
39	Kursi Fiber Glas/Plastik	1 Unit	Baik
40	Kursi Rapat	170 Unit	Baik
41	Kursi Tamu	9 Unit	Baik
42	Kursi Putar	15 Unit	Baik
43	Kursi Biasa	69 Unit	Baik
44	Kursi Lipat	32 Unit	Baik
45	Meja Komputer	8 Unit	Baik
46	Sofa	14 Unit	Baik
47	Lemari Es	6 Unit	Baik
48	A.C Window	5 Unit	Baik
50	A.C Split	52 Unit	Baik
51	Kipas Angin	10 Unit	Baik
52	Camera Video	16 Unit	Baik
53	Camera Film	3 Unit	Baik
54	Handy Cam	9 Unit	Baik
55	Alat Pemadam	16 Unit	Baik
56	Meja Kerja	164 Unit	Baik
57	Meja Tamu	1 Unit	Baik
58	Kursi Kerja	292 Unit	Baik
59	P.C Unit	112 Unit	Baik
60	Laptop	60 Unit	Baik
61	Notebook	34 Unit	Baik

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
62	Tablet P.C	1 Unit	Baik
63	Personal Computer	13 Unit	Baik
64	Peralatan Computer	10 Unit	Baik
65	CPU	7 Unit	Baik
66	Monitor	10 Unit	Baik
67	Printer	175 Unit	Baik
68	Scanner	4 Unit	Baik
69	Modem	3 Unit	Baik
70	Peralatan Jaringan Lainnya	8 Unit	Baik
71	Rambu-Rambu Petunjuk	17 Unit	Baik

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

II.III KINERJA PELAYANAN

Selama periode tahun 2016 – 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai upaya merealisasikan tujuan dan sasaran strategis, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021. Hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan selama periode renstra tersebut diukur dari sejauh mana realisasi indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terdapat 24 (Dua Puluh Empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2016-2021, yakni:

1. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap
2. Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase
3. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten

4. Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten
5. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
6. Persentase penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak
7. Persentase penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman
8. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah
9. Persentase Akses Sanitasi Aman
10. Persentase Akses Sanitasi Layak
11. Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan
12. Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai
13. Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap
14. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi
15. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
16. Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
17. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang
18. Persentase Ijin yang Dikeluarkan Sesuai dengan Tata Ruang
19. Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah
20. Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
21. Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi
22. Persentase Aset Tanah Tanah Pemkab yang Terinventarisir dan Dipatenkan
23. Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi
24. Persentase Aset Tanah Pemkab yang terinventarisir

Capaian indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tolok ukur pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar selama periode Renstra 2016 – 2021 secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan					
				2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya Pencegahan Bencana	Persentase Luasan Kawasan Banjir Yang Terlindungi		37,54	-	-	-	-	-	37,54	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Produksi Dan Produktifitas Pertanian	Persentase Luasan Pertanian Yang Terlayani Air Irigasi		83,00	-	-	-	-	-	83,00	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kabupaten		-	37,87	38,54	41,10	44,49	46,24	-	37,87	40,44	-	-	-	-	100	104,93	-	-	-
		Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan		-	62,50	66,70	66,73	66,75	66,77	-	66,68	66,70	-	-	-	-	106,69	100,00	-	-	-

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan					
				2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kabupaten																			
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik		-	64,47	74,50	81,15	84,51	87,87	-	73,93	78,79	-	-	-	-	114,68	105,76	-	-	-
4	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Berkualitas Dan Terintegrasi	Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten		98,73	-	-	-	-	-	98,81	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
		Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap		71,74	-	-	-	-	-	71,74	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap		-	72,14	73,12	79,14	81,03	82,95	-	73,10	76,55	-	-	-	-	101,33	104,69	-	-	-
		Persentase Panjang Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap		-	72,27	73,47	76,47	77,81	79,16	-	72,60	75,14	-	-	-	-	100,46	102,27	-	-	-
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Drainase Kawasan Perkotaan	Persentase Luasan Kawasan Perkotaan Yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase (Penduduk)		46,97	-	-	-	-	-	46,97	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan						
				2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase Luasan Kawasan Perkotaan Yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase (Pengurangan Genangan)		60,66	-	-	-	-	-	60,66	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	
7	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan Yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase		-	45,98	48,68	50,45	51,62	53,09	-	47,26	49,34	-	-	-	-	102,78	101,36	-	-	-	
8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis, Layanan Air Minum Dan Infrastruktur Air Limbah Permukiman	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman		79,52	-	-	-	-	-	85,93	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	
		Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Layanan Limbah		61,57	-	-	-	-	-	-	80,53	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
		Persentase Tersedianya Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Strategis		100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan					
				2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak		-	80,57	85,11	100,00	100,00	100,00	-	84,65	86,94	-	-	-	-	105,06	102,15	-	-	-
		Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman		-	16,72	17,98	18,17	18,35	18,53	-	16,72	17,98	-	-	-	-	100	100,00	-	-	-
10	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Layanan Air Limbah		-	76,74	83,12	100,00	100,00	100,00	-	78,65	84,95	-	-	-	-	102,49	102,20	-	-	-
		Persentase Akses Sanitasi Aman		-	7,63	8,94	9,81	10,10	10,30	-	8,91	9,55	-	-	-	-	116,78	106,82	-	-	-
		Persentase Akses Sanitasi Layak		-	76,74	83,12	100,00	100,00	100,00	-	78,65	84,95	-	-	-	-	102,49	102,20	-	-	-
11	Meningkatnya Kawasan Strategis Dengan Infrastruktur Yang Memadai	Persentase Luas Kawasan Strategis Dengan Infrastruktur Yang Memadai		-	83,41	84,57	N/A	N/A	N/A	-	83,13	84,62	-	-	-	-	99,66	100,06	-	-	-
12	Meningkatnya Bangunan Dan Lingkungan Yang Dilakukan Penataan	Persentase Tersedianya Tata Bangunan Dan Lingkungan		-	78	88,93	89,29	89,64	90,00	-	88,57	88,93	-	-	-	-	113,55	100,00	-	-	-

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan					
				2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)
13	Meningkatnya Ketertiban Ruang Dan Bangunan	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Dan Bangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		92,15	-	-	-	-	-	92,15	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
14	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang		-	92,16	92,17	92,18	92,19	92,20	-	92,16	92,172	-	-	-	-	100	100,00	-	-	-
15	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang		-	100	100	100	100	100	-	101,64	100	-	-	-	101,64	100,00	-	-	-	
16	Meningkatnya Ketertiban Ruang Dan Bangunan	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi		84,00	-	-	-	-	-	84,50	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
17	Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi		-	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	-	87,33	87,50	-	-	-	-	100,38	100,00	-	-	-

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan					
				2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi																			
18	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi		100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
		Persentase Tersedianya Bangunan Gedung Negara Yang Memenuhi Persyaratan Bagi Seluruh Aparatur		36,05	-	-	-	-	-	36,05	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
19	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
20	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan		-	100	82,00	85,00	85,05	85,10	-	100	84,95	-	-	-	-	100	103,60	-	-	-
21	Meningkatnya Ijin Yang Dikeluarkan Sesuai Dengan	Persentase Ijin Yang Dikeluarkan Sesuai Dengan Tata Ruang		-	100	-	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan					
				2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Tata Ruang																				
22	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah		100	-	-	-	-	-	77,77	-	-	-	-	-	77,77	-	-	-	-	-
23	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah		-	100	100,00	100	100	100	-	100	100,00	-	-	-	-	100	100,00	-	-	-
24	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persenatase Aset Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi		21,94	-	-	-	-	-	21,94	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
25	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi Dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi Dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agrarian		-	100	100,00	100	100	100	-	100	100,00	-	-	-	-	100	100,00	-	-	-
26	Program	Persenatase Aset		21,94	-	-	-	-	-	24,44	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian dan Proyeksi Capaian* pada Tahapan					
				2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi																			
27	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi		-	29,22	46,67	64,12	N/A	N/A	-	17,66	52,72	-	-	-	-	60,42	112,97	-	-	-
28	Program Penatagunaan Tanah	Persenatase Aset Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi		21,94	-	-	-	-	-	21,94	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
29	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir Dan Dipatenkan	Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir Dan Dipatenkan		-	100	100,00	100	N/A	N/A	-	100	100,00	-	-	-	-	100	100,00	-	-	-
30	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Program Survey, Pengukuran Dan Pemetaan	Persentase Aset Tanah Pemkab Dalam Satu Tahun		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya pencegahan bencana	Persentase Luasan kawasan banjir yang terlindungi	1.668.983.850	-	-	-	-	-	1.652.079.366	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian	Persentase LuasanPertanian yang Terlayani Air Irigasi	6.782.287.400	-	-	-	-	-	5.210.845.928	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	-	11.287.788.030	12.065.468.163	9.110.178.163	15.649.672.694	15.962.666.148	-	8.298.259.562	10.508.914.630	-	-	-
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Yang berkualitas dan Terintegrasi	Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten	65.271.835.722	-	-	-	-	-	62.480.648.450	-	-	-	-	-
		Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Meningkatnya Jalan dalam kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	-	56.030.378.908	127.168.441.931	74.126.203.240	207.455.652.727	211.604.765.782	-	52.168.817.151	117.042.291.955	-	-	-
		Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	-	7.663.197.528	52.325.285.828	25.187.460.000	36.543.882.640	37.274.760.293	-	4.478.884.544,56	47.814.138.998	-	-	-
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Drainase Kawasan Perkotaan	Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase (Penduduk)	3.445.362.000	-	-	-	-	-	3.161.197.965	-	-	-	-	-
		Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase (Pengurangan genangan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	-	6.493.967.530	13.167.884.564	11.140.977.198	9.708.052.569	9.902.213.620	-	6.248.098.427,00	12.302.689.626	-	-	-
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman pada kawasan strategis, layanan air minum dan infrastruktur air limbah permukiman	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	16.137.813.191	-	-	-	-	-	15.095.908.621	-	-	-	-	-
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Limbah	7.598.092.630	-	-	-	-	-	7.254.634.074	-	-	-	-	-
		Persentase Tersedianya tata bangunan dan lingkungan Kawasan Strategis	13.141.486.364	-	-	-	-	-	11.063.273.872	-	-	-	-	-

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum layak	-	17.493.926.977	24.079.268.031	6.778.956.950	17.239.191.300	17.583.975.126	-	15.689.720.000	21.996.033.206	-	-	-
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman	-											
10	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	-	6.648.047.497	12.828.317.381	5.300.820.000	14.008.464.800	14.288.634.096	-	6.509.081.480	12.575.541.400	-	-	-
		Persentase Akses Sanitasi Aman	-											
		Persentase Akses Sanitasi Layak	-											
11	Meningkatnya Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	-	9.062.064.850	15.571.507.240	-	-	-	-	7.671.716.539,01	14.841.795.550	-	-	-
12	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan Penataan	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	-	9.374.745.000	23.187.848.188	31.978.935.558	48.836.138.719	49.812.861.493	-	8.452.020.800	20.055.765.543	-	-	-
13	Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Persentase pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang	944.129.813	-	-	-	-	-	778.230.729	-	-	-	-	-
14	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	-	747.421.300	502.421.300	1.222.781.100	1.223.671.100	1.248.144.522	-	733.152.938	486.293.100	-	-	-

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
15	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	-	593.307.266	956.707.266	514.707.200	452.207.000	461.251.140	-	585.902.606	943.642.700	-	-	-
16	Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	434.196.200	-	-	-	-	-	415.617.609	-	-	-	-	-
17	Meningkatnya kualitas pelaku jasa konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	-	160.314.400	341.286.000	813.593.300	517.933.850	528.292.527	-	158.293.440	305.906.200	-	-	-
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Persentase Tersedianya Bangunan Gedung Negara yang memenuhi persyaratan bagi seluruh aparatur	9.153.321.811	-	-	-	-	-	7.770.297.231	-	-	-	-	-
19	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	3.857.471.908	-	-	-	-	-	3.497.777.733	-	-	-	-	-
20	Terselenggara nya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	-	15.629.045.252	19.125.666.705	-	-	-	-	11.049.584.205	17.215.648.716	-	-	-
21	Meningkatnya Ijin yang Dikeluarkan Sesuai dengan Tata Ruang	Persentase Ijin yang Dikeluarkan sesuai dengan Tata Ruang	-	10.000.000	-	-	-	-	-	2.006.000	-	-	-	-

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
22	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah	61,179.000	-	-	-	-	-	51.935.000	-	-	-	-	-
23	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah	-	226.571.100	135.371.100	172.913.100	257.303.172	262.449.235	-	154.120.300	127.602.600	-	-	-
24	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persenatase Aset Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	7.902.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
25	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma graria	Persentase Koordinasi, fasilitasi dan informasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agrarian	-	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	6.650.000	646.000	-	-	-
26	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persenatase Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	1.265.928.800	-	-	-	-	-	1.248.616.385	-	-	-	-	-
27	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	-	800.000.000	1.108.648.000	795.025.000	-	-	-	571.374.556	443.321.626	-	-	-
28	Program Penatagunaan Tanah	Persenatase Aset Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	69.444.200	-	-	-	-	-	49.715.100	-	-	-	-	-
29	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase aset tanah pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan	-	129.910.200	22.910.200	20.000.000	-	-	-	84.474.568	3.548.000	-	-	-

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
30	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	,	,	,	,	578.795.000	590.370.900	,	,	,	,	,	,
31	Program Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Persentase Aset Tanah Pemkab dalam Satu Tahun	,	,	,	,	110.000.000	112.200.000	,	,	,	,	,	,

II.IV TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan coordinator Pemerintah Kabupaten Banjar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Perencana memiliki peran penting sehingga perlu mendapatkan perhatian dengan melibatkan pihak terkait. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangatlah tergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah.

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tantangan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan memiliki beberapa pertimbangan yang menjadi tantangan, yaitu :

1. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam seperti saat ini dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat.
2. SDM yang terbatas sehingga memerlukan kebijakan pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien
3. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, perlu diimbangi dengan kemampuan SDM terhadap penguasaan teknologi yang cepat pula
4. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat memerlukan Sumber Daya Aparatur yang handal
5. Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
6. Masih terdapat daerah yang rawan genangan banjir yang harus segera ditangani
7. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan jembatan
8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan tata ruang

9. Belum tersedianya LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) pada Bidang Konstruksi
10. Sebagian tupoksi bidang pertanahan berada di BPN sehingga bidang pertanahan tidak mempunyai wewenang

B. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu :

1. Peningkatan keterampilan bagi SDM dalam penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat
2. Tersedianya berbagai sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Tuntutan masyarakat terhadap prosedur kerja yang baik memberikan kesempatan untuk menata dan membenahi diri secepat mungkin
4. Tersedianya peraturan atau regulasi pendukung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
5. Pendekatan pembangunan yang bersifat terencana dengan matang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efektif dan efisien
6. Apresiasi masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan memungkinkan adanya *feedback* dalam rangka perbaikan produk perencanaan yang lebih partisipatif.
7. Fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan memberikan peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk pengembangan layanan yang dibutuhkan masyarakat dan para pihak terkait.

B A B

Perubahan Rencana Strategis

3

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Banjar

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.I IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Identifikasi berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021) perlu dilakukan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Lingkungan Internal
 - a. Identifikasi Kekuatan (*Strengths*)

Pelaksanaan proyek berdasarkan hasil analisa, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Faktor faktor kekuatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai tupoksinya berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dinas tersebut disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Banjar dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
- 2) Suasana kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan Kabupaten Banjar cukup kondusif (kebersamaan diusahakan terjadinya suasana demokratis dengan melonggarkan ikatan struktural) yang kadang-kadang menghambat gerak organisasi jika diterapkan secara kaku. Ikatan tersebut dapat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (*team work*). Suasana ini dipupuk terus terutama dalam kegiatan rapat-rapat pimpinan maupun diskusi-diskusi

dalam tim-tim kerja penyusunan berbagai substansi yang merupakan kewajiban Dinas.

- 3) Tersedianya staf pendukung pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan SOTK yang ada, dirasa mampu untuk menggerakkan pembangunan di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, dan Pertanahan. Selain itu staf pendukung senantiasa memanfaatkan akses terhadap pelaksanaan dan lembaga-lembaga terkait yang melakukan kegiatan/proyek fisik di Kabupaten Banjar sehingga memudahkan dalam penerapan paradigma dalam instansi Lainnya yang berada di daerah ini. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, sesuai dengan fungsinya senantiasa diminta bantuan teknis maupun personil oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya mengenai segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di instansi yang berada di Kabupaten Banjar.

b. Identifikasi Kelemahan (*Weakness*)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut sebagai berikut :

- 1) Sumber daya aparatur yang berkualifikasi teknis dan managerial masih terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam kemampuan unit-unit Kerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 2) Sarana dan prasarana penunjang operasional kerja belum optimal seperti peralatan komputer dan alat transportasi untuk meningkatkan kinerja petugas dilapangan masih perlu pertambahan jumlahnya.
- 3) Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari APBD. Hal ini sebagai dampak dari krisis ekonomi yang bersumber dari krisis multi dimensional yang melanda negara kita yakni menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah.

2. Identifikasi Lingkungan Eksternal

a. Identifikasi Peluang (*Opportunities*)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam mencapai Visi dan Misinya diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan dan dukungan dari pimpinan daerah serta *stakeholders* yang terkait dengan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, merupakan peluang yang sangat penting bagi pengembangan organisasi ini dimasa depan.
- 2) Kondisi keamanan didaerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan Daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi perkembangan pelaksana Kegiatan pembangunan.
- 3) Terbukanya bagi setiap pegawai untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuannya merupakan peluang yang penting terutama akan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

b. Identifikasi Ancaman (*Threats*)

Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat pula ancaman terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama datang dari luar dinas yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah:

- 1) Kondisi alam Kabupaten Banjar yang kurang mendukung seperti bentang alam dan curah hujan yang bervariasi, sehingga sulit dijangkau di daerah yang terpencil.
- 2) Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap ketersediaan jaringan jalan dan infrastruktur. Kurangnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas berdampak langsung pada masyarakat, petani pada khususnya. Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan. Masih terjadinya kerusakan pada *catchment area*, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim. Selain itu, lajunya pertumbuhan lalu lintas tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada serta kondisi fisik ruas jalan dan jembatan yang kurang memadai sangat berpengaruh pada keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa ke pusat perekonomian masyarakat. Dukungan konektivitas nasional dalam penguatan daya saing masih menghadapi

beberapa kendala. Kendala yang paling mendasar adalah kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah.

- 3) Kurangnya partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an. Selain itu mutu sumber daya manusia sektor konstruksi tidak kurang memprihatinkan, yakni masih banyaknya tenaga kerja yang belum disertifikasi.

Selain hal tersebut di atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi sesuai dengan fungsi pelayanan beserta faktor yang mempengaruhinya tersebut di bawah ini:

1. Permasalahan Penataan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang:
 - Belum optimalnya instrumen penataan bangunan dan kurangnya pedoman untuk pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang;
 - Masih terdapat pelanggaran peraturan tata ruang dan tata bangunan hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan atau kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dengan prosedur yang tepat atau mengkonsultasikannya ke dinas teknis sehingga masih diperlukan sosialisasi peraturan ke aparat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - Kawasan tradisional bersejarah, kawasan kumuh dan kawasan-kawasan strategis kurang tertata karena kurangnya koordinasi antar kegiatan yang terkait dan alokasi dana yang besar untuk penanganan kawasan tersebut;
 - Jumlah SDM tata ruang yang berkualitas belum memadai dengan luasan wilayah Kaupaten Banjar;
 - Rasio jumlah luas daerah yang mesti dikendalikan tidak sebanding dengan jumlah aparat pengendalian dan penataan ruang;
2. Permasalahan Penataan Bangunan
 - Kondisi bangunan gedung dan rumah negara yang tidak representatif karena penyusutan/berakhirnya umur bangunan, beban fungsi yang berlebih atau atas sebab lain;
 - Sulitnya pengawasan bangunan pada saat proses pembangunan;
 - Belum tegasnya kepastian hukum terkait pelaksanaan pembangunan gedung;
 - Kesadaran serta pengetahuan aparat masih rendah khususnya di kecamatan terkait teknis IMB;

- Belum optimal fungsi lembaga hukum yang bertugas sebagai Penegak hukum Perda Bangunan Gedung;
 - Penyesuaian aturan pelaksana di daerah dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Penyediaan air minum untuk memenuhi cakupannya masih rendah, karena:
- Belum dapat terpenuhinya penyediaan kualitas air langsung minum;
 - Sulitnya ketersediaan air baku di lokasi-lokasi yang jauh terjangkau jaringan perpipaan PDAM khususnya wilayah perdesaan disebabkan faktor menurunnya kuantitas dan kualitas air baku air minum;
 - Belum semua kecamatan terbangun Instalasi Air Bersih Kota Kecamatan (IKK) disebabkan faktor pembiayaan yang terbatas dan penyiapan kelembagaan dan SDM yang terampil;
 - Jangkauan jaringan perpipaan PDAM pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik diperkotaan dan perdesaan masih rendah karena faktor pembiayaan dan kemampuan keuangan masyarakat yang rendah;
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana penyedia air bersih yang telah terbangun;
 - Sulitnya ketersediaan air baku akibat menurunnya kuantitas dan kualitas air baku air minum serta tidak semua kecamatan di Kabupaten Banjar memiliki air baku;
 - Sebagian Badan Pengelola Swadaya (BPS) prasarana dan sarana air bersih yang terbangun baik yang berbasis masyarakat kurang aktif;
 - Belum dapat terpenuhinya penyediaan kualitas air langsung minum;
 - Faktor pendanaan daerah masih minim sehingga masih memerlukan anggaran sharing dari pemerintah pusat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan khususnya pengelolaan air limbah permukiman yang masih perlu ditingkatkan karena:
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap dampak pembuangan air limbah kegiatan rumah tangga karena faktor kurangnya sosialisasi PHBS dan standar pengolahan air limbah;
 - Masih banyak rumah tangga yang belum terlayani dengan pengelolaan air limbah yang memenuhi standar

- Memerlukan investasi yang besar dalam penyediaan pengelolaan air limbah skala kawasan karena faktor kondisi demografi, geografis dan geologis yang kurang mendukung seperti yaitu rumah-rumah penduduk yang terpencar tidak beraturan, permukiman sepanjang bantaran sungai, tanah berawa;
 - Terbatasnya pendanaan daerah dalam memenuhi target layanan air limbah;
 - sulitnya lahan tersedia bagi pembangunan sarana MCK komunal bersifat hibah yang berdekatan dengan perumahan penduduk dan masih terpencar terutama di daerah perdesaan karena faktor nilai tanah yang sudah naik pada lokasi yang berdekatan dengan perumahan penduduk;
 - Akses cakupan layanan air limbah masih minim;
 - Tidak standarnya septic tank di masyarakat;
 - Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan tinja;
 - Fungsi regulator dan operator pengolahan air limbah masih menjadi satu dan belum optimal.
5. Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan berupa pengelolaan drainase yang belum optimal adalah:
- Dimensi saluran yang sudah tidak sesuai lagi dengan besaran debit air hujan karena faktor berkurang daya resap tanah pada *cathment* area akibat penutupan lahan daerah resapan;
 - Pendangkalan dan penyempitan saluran drainase yang ada karena faktor sedimen yang terbawa *surface run off*, pembangunan permukiman serta normalisasi saluran yang kurang;
 - Masih terdapat jaringan drainase yang belum terintegrasi antara sistem drainase primer, sekunder dan tersier.
 - Pengelolaan sistem drainase masih bersifat parsial karena faktor belum siapnya kelembagaan dan SDM serta perencanaan yang dibuat;
 - Minimnya alokasi dana untuk operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan drainase;
 - Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan drainase;
 - Belum adanya pemetaan drainase untuk wilayah perkotaan dengan baik karena penanganan drainase hanya bersifat parsial.
6. Dampak terjadinya pandemi Covid-19 berakibat terjadinya perubahan dan arah kebijakan daerah yang tentunya juga berdampak pada arah dan kebijakan rencana jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan. Dampak yang sangat dirasakan yaitu terjadinya beberapa penyesuaian dan *refocusing* penganggaran dengan memperhatikan pemulihan ekonomi masyarakat.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

III.II TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Kabupaten Banjar harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya dan tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Kabupaten Banjar dalam beberapa tahun ke depan. Visi dalam mengantisipasi tantangan pembangunan di masa yang akan datang menuju kondisi yang diinginkan maka Kabupaten Banjar perlu secara terus menerus mengembangkan peluang semangat pembangunan untuk mempersiapkan diri agar tetap mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2016-2021, maka visi pembangunan Kabupaten Banjar 2016-2021 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”**. Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

a. Maju

- Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya), berkembang;
- Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

b. Mandiri

- Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain;
- Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba

mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan;

- Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.

c. Agamis

- Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2021-2026, misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar bertindak sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mengaplikasikan misi ke-2 (kedua) yakni meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah. Serta misi ke-3 (ketiga) yakni

terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah.

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Program Penataan Bangunan Gedung;
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Program Pengelolaan Izin Lokasi;
12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
13. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
14. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
15. Program Penatagunaan Tanah;
16. Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah
17. Program Survey, Pengukuran dan Pemetaan

Secara umum program prioritas kepala daerah terpilih tersebut berkesesuaian dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah instansi yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberikan kepuasan kepada seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Banjar khususnya dan masyarakat pada umumnya, melebihi standar layanan publik secara umum pada “Pembangunan sarana dan prasarana dasar kehidupan masyarakat”, pelayanan prima dimaksud harus direncanakan, diselenggarakan dan dikelola dengan sebaik baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Agar komitmen tersebut dapat di wujudkan maka harus ada upaya untuk mewujudkan manajemen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan pokok dan fungsinya, agar tercipta kepercayaan masyarakat umumnya dan perangkat daerah Kabupaten Banjar khususnya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar yang proporsional, produktif, efisien, transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip-prinsip “*good governance*”.



Tabel 3.1
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS

NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI 2 PENINGKATAN EKONOMI YANG BERKUALITAS BERBASIS KERAKYATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKEADILAN				
1	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang masih belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya alokasi anggaran daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peluang untuk memperoleh anggaran dengan sumber dana selain APBD seperti APBD Provinsi dan DAK
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapatnya daerah rawan genangan banjir yang harus segera ditangani • Penanganan drainase masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi. • Tidak maksimalnya fungsi drainase sebagai saluran air karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak limbah dari masyarakat yang langsung dibuang ke saluran drainase tanpa pengolahan terlebih dahulu • Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber-sumber air masih Kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya teknologi yang mendukung pembangunan

NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengelolaan drainase terutama dalam pemeliharaan saluran drainase	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya alokasi anggaran 	
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> Masih terkendala masa tanama 	<ul style="list-style-type: none"> Cuaca yang tidak mendukung sehingga menghambat pekerjaan Masih tahap perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran APBD dan DAK
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> belum dapat terpenuhinya penyediaan kualitas air langsung minum sulitnya ketersediaan air baku akibat menurunnya kuantitas dan kualitas air baku air minum Kurangnya Instalasi Air Bersih di Kecamatan Jaringan Pipa PDAM untuk MBR masih rendah Kurang koordinasinya antara SKPD dengan perusahaan daerah penyelenggara air minum 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Air Baku yang minim karena tidak semua kecamatan memiliki sumber air baku 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya teknologi yang mendukung pembangunan Tersedianya program-program pusat dan hibah luar negeri

NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • kurangnya sosialisasi PHBS dan standar pengolahan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap dampak pembuangan air limbah kegiatan rumah tangga • memerlukan investasi yang besar dalam penyediaan pengelolaan air limbah skala kawasan • sulitnya lahan yang tersedia untuk pembangolan instalasi pengolahan air limbah skala komunal bersifat hibah yang berdekatan dengan perumahan penduduk dan masih terpecar terutama di daerah perdesaan karena nilai tanah yang sudah naik pada lokasi yang berdekatan dengan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya teknologi yang mendukung pembangunan • Tersedianya program-program pusat dan hibah luar negeri

NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Program Penataan Bangunan Lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi bangunan gedung Kantor yang sudah mulai rusak 	<ul style="list-style-type: none"> Harga material yang sering berubah menyebabkan harga satuan harus mengalami penyesuaian 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peraturan perundang-undangan bangunan gedung
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum tersedianya LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Bidang Konstruksi di wilayah Kalimantan Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perubahan regulasi yang berdampak pada kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan persyaratan kompetensi terhadap Tenaga Terampil Konstruksi Sering terhambatnya koordinasi dengan beberapa pihak yang kepentingan terkait pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagai wujud dari tertibnya usaha, tertibnya penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan konstruksi Sulitnya menentukan jadwal pelaksanaan yang sama dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Amanat dari Peraturan Perundang-undang jasa konstruksi

NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pihak-pihak terkait	
MISI 3 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN				
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya media informasi tata ruang di lapangan Kurangnya sosialisasi peraturan ke aparat kecamatan dan desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang belum berupa aturan Keterbatasan SDM dalam proses pendampingan dan pengawasan selama konstruksi Terbatasnya anggaran dalam penyusunan aturan tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa Dokumen RTR sudah tersusun
10	Program Penataan Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat akan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukkannya sehingga perizinannya tidak/ diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketidaklengkapan persyaratan teknis pemohon Bangunan Gedung 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana anggaran kas
11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi jalam sebagian desa terendam air 	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi cuaca yang tidak menentu Kurang mengertinya masyarakat tentang pendataan potensi konflik sehingga sulit meminta data 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dari pihak desa Transportasi roda 4 (empat) yang tersedia menuju lokasi

NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	<ul style="list-style-type: none"> Bukan tupoksi bidang pertanahan tapi BPN, bidang pertanahan hanya sebagai anggota tim 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang pertanahan tidak mempunyai wewenang karena hanya sebagai anggota tim 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dana anggaran kas untuk koordinasi dengan pihak BPN Merupakan program nasional dari kementerian ATR/BPN
13	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Ada sebagian tanah aset pemkab yang terletak di dalam kawasan hutan sehingga tidak dapat disertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk alas hak berupa hibah, adanya ketidaksamaan informasi antara ahli waris tanah dan pemda Untuk alas hak berupa pengadaan tanah pemda banyak berkas pelepasan hak yang tidak lengkap Untuk alas hak berupa sertifikat sebagian besar masih atas nama penjual jadi harus dilakukan balik nama atas nama pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Monev capaian sertifikat aset pemkab banjar oleh KPK Keinginan dari pihak sekolah/puskemas sebagai syarat permohonan rehabilitasi sumber dana DAK dari Kementerian

NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Program Penatagunaan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Data di KIB berbeda dengan di lapangan • Surat atas hak tanah/data yuridis banyak tidak ditemukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi cuaca yang tidak menentu • Lokasi yang sulit dijangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan evaluasi dari koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi oleh KPK
MISI 4 PENYELENGGARAAN KEPERINTAHAN YANG AMANAH, BAIK, BERSIH DAN EFEKTIF				
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas aparatur terbatas • Sulitnya mencari Tenaga ahli dalam pemeliharaan • Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir terbatas • Metode pemberdayaan belum diterapkan secara baik • koordinasi lintas sektor antara provinsi dengan Kab/Kota belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM aparatur bidang teknis tidak mengalami penambahan • Pemutakhiran data dan informasi belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan dan SDM aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan secara maksimal • Kegiatan bersifat rutin yang kebutuhannya untuk pelayanan perkantoran • Adanya SDM administrasi yang memadai dalam tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran

III.III TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.



Tabel 3.2
Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah cakupan penanganan sangat luas 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kemampuan anggaran daerah yang untuk penanganan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen daerah untuk meningkatkan produksi pertanian • Telah ada pembagian kewenangan penanganan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten • Adanya sharing dana dari level yang lebih atas
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah cakupan penanganan sangat luas • Inventaris data dan informasi jaringan jalan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten merupakan daerah terdampak banjir, sehingga umur dan kualitas jalan mudah rusak • Terbatasnya kemampuan anggaran daerah untuk penanganan jaringan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen daerah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah • Telah ada pembagian kewenangan penanganan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten • Adanya sharing dana dari level yang lebih atas

3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah cakupan penanganan sangat luas • Pertumbuhan penduduk dan permukiman sangat pesat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kemampuan anggaran daerah untuk penanganan kawasan permukiman • Inventaris data dan informasi kawasan permukiman belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas permukiman • Telah ada pembagian kewenangan penanganan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten • Adanya sharing dana dari level yang lebih atas
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kualitas pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kemampuan anggaran daerah untuk pembinaan pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya fasilitasi dari Balai Jasa Konstruksi PUPR Wilayah V Banjarmasin
5	Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ditetapkannya RDTR menjadi sebuah aturan • Dinamika pertumbuhan pembangunan sangat signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses legalisasi RDTR memerlukan waktu yang panjang dan perlu kesepakatan pemangku kepentingan • Minimnya alokasi anggaran APBD untuk mendukung penyusunan dan pengawasan tata ruang dan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk percepatan legalisasi RDTR

Adapun telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024 mempunyai isu strategis yaitu :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku

Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain:

- a. Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air;
- b. Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku;
- c. Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan
- d. Penyusunan Indeks Ketahanan Air dimana Kementerian PUPR mendukung penyusunan Indeks Ketahanan Air Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain:

- a. Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya Air;
- b. Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi;
- c. Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum;
- d. Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air antara lain:

- a. Pengembangan sistem informasi sumber daya air;

- b. Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (DSS, forecasting, early warning) dengan memanfaatkan teknologi baru (*satelit, radar, real-time system, water accounting systems*)

2. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional. Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, merupakan salah satu formula handal dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur jalan dapat membuka akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan, investasi, serta dapat menjadi pendorong perputaran/siklus kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi lokal.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

3.1 Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman.

Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
- b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
- c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (*Non-Revenue Water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas;
- b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
- c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
- d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
- e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ *Water Safety Plan* (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
- f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
- g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
- b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
- c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
- d. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
- e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
- f. Menerapkan prinsip *Good Governance* untuk penyelenggaraan SPAM;
- g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Kemudian, strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan ialah:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
- b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.

3.2 Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
- c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
- e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;

- b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;
- c. Fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
- e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;
- f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:

- a. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.

Adapun strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.

Adapun strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
- b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di daerah;
- c. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
- d. Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif.

Adapun strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan adalah:

- a. Mendorong peningkatan pemulihan biaya (*circular economy*) dalam pengelolaan sanitasi;
- b. Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;

- c. Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang sanitasi.

3.3 Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;

- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi

- a. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air,
- b. Meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan
- c. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi.

Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program tersebut maka disusun 5 arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, melalui:
 - 1) Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan asesor bidang konstruksi;
 - 2) Pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi; dan
 - 3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk SDM vokasional.
- b. Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.
- c. Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
- d. Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui:
 - 1) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi;
 - 2) Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.

- e. Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi, melalui:
- 1) Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan konstruksi;
 - 2) Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi;
 - 3) Mendorong peningkatan kinerja OPD sub bidang jasa konstruksi; dan
 - 4) Pengembangan kerja sama antar Lembaga.

Adapun telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020–2024 mempunyai isu strategis yaitu :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Aspek Penataan Ruang
Kebijakan Aspek Penataan Ruang dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali
 - b. Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang

Adapun strategi Aspek Penataan Ruang adalah:

- a. Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang
- b. Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder
- c. Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat Eselon III)
- d. Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan kepemilikan bidang tanah (3R - Rights Restrictions dan Responsibilities atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T)
- e. Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang

2. Arah Kebijakan Aspek Penggunaan Tanah

Kebijakan Aspek Penggunaan Tanah dilakukan dengan:

- a. Pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasikan prinsip *right*, *restriction* dan *responsibility* (3R) ke dalam bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat
- b. Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya penataan ruang yang mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim
- c. Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat

Adapun strategi Aspek Penggunaan Tanah adalah:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
- b. Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sehat)



III.IV TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.3

Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Terkait Fungsi dan Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

No (1)	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD (2)	Permasalahan Pelayanan SKPD (3)	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
1	RDTR, Peraturan zonasi dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan,	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya instrumen penataan bangunan dan kurangnya pedoman untuk pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Belum legalnya peraturan RDTR dan Zonasi serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada hasil studi dan draft terkait RDTR dan peraturan Zonasi dan Rencana Tata Bangunan & Lingkungan untuk beberapa wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya pelanggaran peraturan tata ruang dan tata bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengetahuan atau kesadaran masyarakat tentang peraturan tata ruang serta pengajuan IMB sesuai prosedur yang tepat atau mengkonsultasikannya ke dinas teknis; Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Kurang tegasnya 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada sosialisasi tata ruang & IMB ke masyarakat dan aparat untuk mewujudkan tertib pembangunan dan meningkatkan keselamatan pengguna bangunan gedung Sudah disahkannya Perda RTRW no. 3 tahun 2013 dimana telah mengatur mengenai sanksi sanksi pelanggaran tata ruang

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>penindakan aparat terhadap pelanggaran tata ruang;</p> <ul style="list-style-type: none"> Cakupan wilayah Kabupaten Banjar yang ditangani cukup besar 	
		<ul style="list-style-type: none"> Belum terpenuhinya persentase RTH 30 % 	<ul style="list-style-type: none"> keterbatasan lahan yang dikuasai pemerintah untuk penyediaan RTH publik, dan kesulitan dalam mendata & pengendalian untuk RTH Private (10 % dari kawasan RTH perkotaan diperuntukkan untuk RTH Private). Untuk kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan RTH, sebagian lahan masih dimiliki oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Luasnya lahan Kabupaen Banjar memberikan kesempatan atau peluang untuk dimanfaatkan sebagai kawasan RTH Pada tahun 2015, Kabupaten Banjar telah menjadi anggota dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
		<ul style="list-style-type: none"> Rasio jumlah luas daerah yang mesti dikendalikan tidak sebanding dengan jumlah aparat pengendalian dan penataan ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sumber daya manusia dalam pengendalian luas wilayah Kabupaten Banjar 	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengawasan rutin agar meminimalisir pelanggaran terhadap RTRW
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan tradisional bersejarah, kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi antar kegiatan yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Kabupaten yang telah memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung, Kabupaten

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kumuh dan kawasan strategis kurang tertata	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dana yang besar untuk penanganan kawasan tersebut; • Kepemilikan bangunan tradisional bersejarah masih dimiliki perorangan • Keterbatasan lahan untuk penataan kawasan kumuh • Meluasnya kawasan –kawasan kumuh yang telah ada tidak terkendali • Kurangnya infrastruktur pendukung pada kawasan strategis 	<p>Banjar termasuk dalam Kawasan strategis nasional dengan klasifikasi <i>cluster A</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedia basis data terkait kawasan tradisional bersejarah • Kabupaten Banjar telah terdaftar sebagai anggota dalam P3KP (Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka) • Adanya Program Pemerintah dengan target sasaran 100-0-100 (100% akses layanan air minum, 0 % berkurangnya kawasan kumuh, 100 % layanan sanitasi)

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Selain itu juga mengacu pada Perda Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembangunan Desa Terisolasi di Kabupaten Banjar dimana terdapat 61 Desa Terisolir.

Berikut ini disajikan telaahan muatan KLHS yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar periode sebelumnya sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, berikut faktor penghambat dan pendorongnya.



Tabel 3.4

Telaahan Renstra KLHS Terkait Fungsi dan Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

No (1)	Muatan KLHS Kabupaten Banjar (2)	Permasalahan Pelayanan SKPD (3)	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
1	Isu Lingkungan			
a.	Pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan tradisional bersejarah, kawasan kumuh dan kawasan-kawasan strategis kurang tertata. 	<ul style="list-style-type: none"> Bermunculannya kawasan kumuh yang tidak terkendali di kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penanganan kawasan kumuh saat ini masih bersifat sektoral. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen pemerintah dalam mengurangi kawasan kumuh melalui program 100-0-100 (100% akses layanan air minum, 0 % berkurangnya kawasan kumuh, 100 % layanan sanitasi).
		<ul style="list-style-type: none"> Belum terpenuhinya persentase RTH 30 % termasuk 10 % RTH private dan 20 % RTH publik. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ambiguitas dimana di satu sisi menyadari kepentingan lingkungan hidup namun di sisi lain mementingkan kepentingan perekonomian. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang fungsi RTH sebagai pelestarian fungsi lingkungan serta sebagai sumber oksigen.
		<ul style="list-style-type: none"> Bangunan gedung dan rumah negara yang terbangun belum memenuhi kriteria bangunan yang ramah lingkungan (<i>Green Building</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> Proses pemrograman, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan , pembongkaran bangunan yang masih tidak berwawasan lingkungan. Bangunan dengan konsep <i>Green</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Telah adanya peraturan-peraturan yaitu Permen PUPR no. 2/PRT/M/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau.

No (1)	Muatan KLHS Kabupaten Banjar (2)	Permasalahan Pelayanan SKPD (3)	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
			<i>Building</i> membutuhkan alokasi dana yang besar.	<ul style="list-style-type: none"> Perda Kab. Banjar No. 4 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Pada tahun 2015, Kabupaten Banjar telah menjadi anggota dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).
		<ul style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan peraturan perda menyebabkan penyediaan prasarana dan sarana belum memadai hal ini akan berdampak pada pencemaran lingkungan sekitar. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang masih minim. 	<ul style="list-style-type: none"> Telah tersedia perda kab. Banjar No. 14 tahun 2014 yang mengatur tentang perumahan dan permukiman.
		<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pengetahuan dan minat masyarakat untuk mengakses prasarana air limbah. Ketidaksesuaian realisasi teknis bangunan instalasi air limbah dengan peraturan terkait dan berpotensi pada terjadinya 	<ul style="list-style-type: none"> Kepedulian masyarakat dalam mengakses & mengelola sarana dan prasarana air limbah masih kurang. Meningkatnya persepsi negatif dari masyarakat terhadap kehadiran IPLT/IPAL yang berada dekat dengan lokasi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan sosialisasi & FGD dengan masyarakat dengan bekerjasama dengan OPD lain terkait pengetahuan mengenai air limbah. Telah tersedia Permen PUPR No. 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan

No (1)	Muatan KLHS Kabupaten Banjar (2)	Permasalahan Pelayanan SKPD (3)	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
		pencemaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Standard MCK Komunal tidak sesuai dengan peraturan (SNI 03-2399-2002 & SNI 03-2398-2002) dan minimnya pemeliharaan dan pengelolaan bangunan MCK Komunal. • Standar lokasi IPAL/IPLT yang belum sesuai dengan peraturan (Perda 1 tahun 2012). 	<p>Sumber Daya Air.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedia Perda Kab. Banjar No. 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan air limbah yang mengatur mengenai persyaratan teknis bangunan. • Adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan sanitasi air limbah melalui program 100-0-100 (100% akses layanan air minum, 0 % berkurangnya kawasan kumuh, 100 % layanan sanitasi).
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya masyarakat di bantaran sungai yang menggunakan air sungai sebagai sumber air utama • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana penyedia air bersih yang telah terbangun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber-sumber air masih kurang; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilakukan sosialisasi & FGD dengan masyarakat dengan bekerjasama dengan OPD lain terkait pengetahuan mengenai air limbah serta dampak-dampak yang diterima jika terjadi kelalaian dalam pengelolaan air limbah.
B	Alih Fungsi Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio jumlah luas daerah yang mesti dikendalikan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • keterbatasan lahan yang dikuasai pemerintah untuk penyediaan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Luasnya lahan Kabupaten Banjar memberikan kesempatan atau

No (1)	Muatan KLHS Kabupaten Banjar	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Pendorong
	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>sebanding dengan jumlah aparat pengendalian dan penataan ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya persentase RTH 30 % termasuk 10 % RTH private dan 20 % RTH publik. 	<p>publik, dan kesulitan dalam mendata & pengendalian untuk RTH Private (10 % dari kawasan RTH perkotaan diperuntukkan untuk RTH Private).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan RTH, sebagian lahan masih dimiliki oleh masyarakat. 	<p>peluang untuk dimanfaatkan sebagai kawasan RTH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2015, Kabupaten Banjar telah menjadi anggota dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya instrumen penataan bangunan dan kurangnya pedoman untuk pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum legalnya peraturan zonasi dan rencana tata bangunan dan lingkungan yang masih berupa draft. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya hasil studi dan draft terkait peraturan zonasi dan tata bangunan & lingkungan untuk beberapa wilayah
c	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Sulitnya ketersediaan air baku di lokasi pedesaan sehingga jangkauan jaringan perpipaan air bersih pada MBR masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • kondisi demografi, geografis dan geologis yang kurang mendukung seperti rumah-rumah penduduk pedesaan yang terpencar tidak beraturan, permukiman sepanjang bantaran sungai, tanah berawa; • Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilakukan sosialisasi & FGD dengan masyarakat serta bekerjasama dengan OPD lain terkait pengetahuan mengenai air bersih • Peningkatan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum khususnya untuk Masyarakat yang

No (1)	Muatan KLHS Kabupaten Banjar (2)	Permasalahan Pelayanan SKPD (3)	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
				berpenghasilan rendah serta pembangunan infrastruktur air bersih pedesaan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas sumber air minum belum memenuhi standar peraturan yang berlaku • Sulitnya ketersediaan air baku akibat menurunnya kuantitas dan kualitas air baku air minum serta tidak semua kecamatan memiliki air baku • Jangkauan jaringan perpipaan PDAM pada MBR masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Air Bersih di Kecamatan; • Faktor pendanaan yang masih belum mencukupi 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah adanya Permen PUPR No. 26/PRT/M/2015 tentang Prosedur Operasional Standard Pengelolaan SPAM • Telah adanya Peraturan Bupati Kab. Banjar No. 63 tahun 2015 tentang Kebijakan & Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum • Adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan sanitasi air limbah melalui program 100-0-100 (100% akses layanan air minum, 0 % berkurangnya kawasan kumuh, 100 % layanan sanitasi)
d	Pertumbuhan Ekonomi Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya debirokratisasi proses perizinan untuk perumahan terkait dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan yang mengatur aturan sebelumnya belum dicabut serta kurangnya koordinasi antara asosiasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk percepatan legalisasi RDTR untuk kawasan

No (1)	Muatan KLHS Kabupaten Banjar (2)	Permasalahan Pelayanan SKPD (3)	Faktor Penghambat (4)	Faktor Pendorong (5)
	(Sapras perekonomian dan Energi Listrik)	<p>legalisasi Tata Ruang (RDTR) dan RDTR untuk kawasan perumahan yang masih dalam proses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jalan lingkungan permukiman yang begitu luas sehingga rehabilitasi pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang besar • Belum adanya masterplan pembangunan rumah susun untuk masyarakat MBR 	<p>penyedia perumahan dengan pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan investasi publik dalam permukiman dan perumahan serta pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur yang ada terhambat oleh sumber keuangan yang terbatas 	<p>permukiman baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKPD terkait mengajukan usulan tambahan melalui dana APBN • Mengikutsertakan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS RPJMD 2016-2021 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

- Perubahan kualitas sumber daya air bagi sungai dan rawa. Perubahan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya limpasan permukaan yang mengakibatkan tingginya proses sedimentasi hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas air dan habitat perikanan dan hewan rawa lainnya. Pengembangan sumber daya air telah menjadi pendukung program ketahanan pangan, sumber ketersediaan air bersih dan keperluan lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air dan pengendalian banjir.
- Perlu ada upaya peningkatan perekonomian sektor pertanian baik melalui kecukupan sektor irigasi sebagai pendukung pemanfaatan lahan pertanian secara optimal.
- Infrastruktur jalan bagus, ekonomi tumbuh, maka pengangguran akan bisa kita kurangi. Kalau jalan bagus, transportasi dan kebutuhan pokok lancar, itu akan mengurangi inflasi. Banyak sentra produksi dan ekonomi saat ini belum terhubung sampai pelosok.
- Infrastruktur Pekerjaan Umum, pada hakikatnya telah memberi landasan yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai contoh pengembangan sumber daya air telah menjadi pendukung program ketahanan pangan, dan menjadi sumber air bagi penyediaan air minum dan air untuk berbagai keperluan lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air dan pengendalian banjir.
- Infrastruktur merupakan suatu kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan, agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.
- Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

III.V PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dengan menggunakan metode pembobotan yakni sebagai berikut :

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Total skor diperoleh dari hasil perkalian Nilai Skala Kriteria dengan Bobot masing-masing Kriteria. Adapun perhitungan Nilai Skala Kriteria dan Total Skor adalah sebagai berikut :



Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

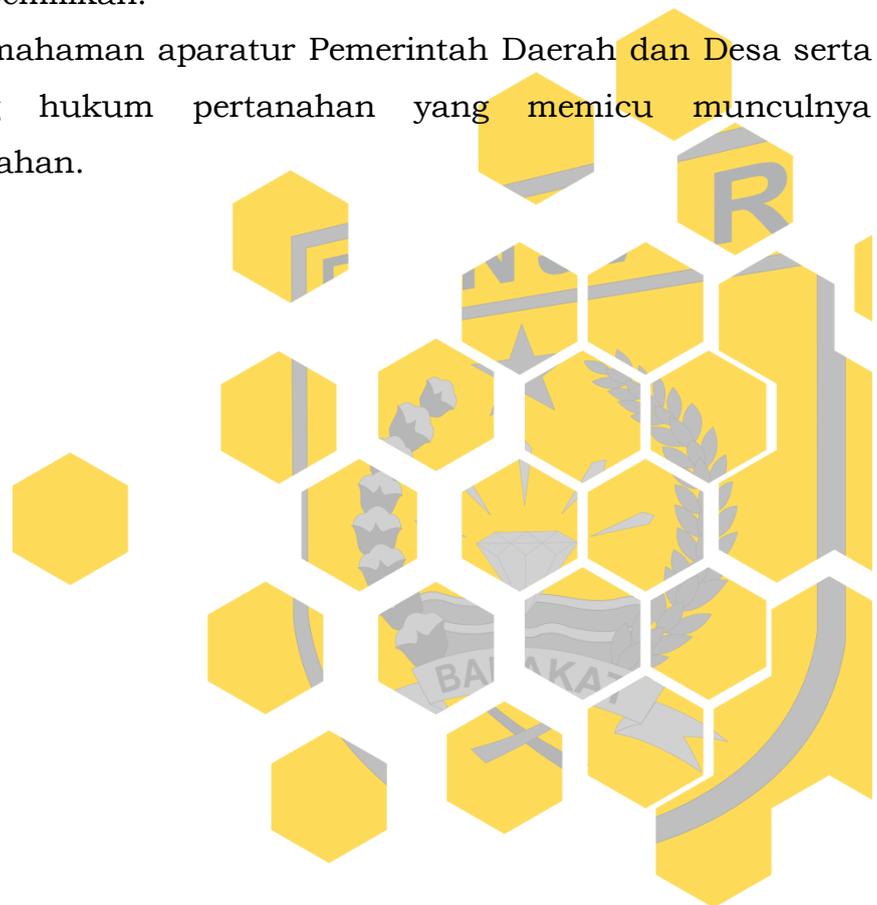
No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas berdampak langsung pada sektor pertanian pada khususnya	1	1	1	1	1	1	100
2	Penambahan dan peningkatan kapasitas jalan yang ada tidak sebanding dengan laju pertumbuhan lalu lintas	1	1	1	1	1	1	100
3	Jaringan irigasi masih memerlukan penanganan	1	1	1	1	1	1	100
4	Kondisi Fisik Ruas Jalan dan Jembatan yang kurang memadai sangat berpengaruh pada keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa ke Pusat Perekonomian masyarakat	1	1	1	1	1	1	100
5	Dukungan konektivitas nasional dalam penguatan daya saing masih menghadapi beberapa kendala. Kendala yang paling mendasar adalah kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah.	1	1	1	1	0	1	85
6	Masih terjadinya kerusakan pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim	1	1	1	1	0	1	85
7	Masih belum optimalnya layanan penyediaan akses Sistem Pengolahan Air Minum yang aman terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1	1	1	1	1	1	100
8	Masih rendahnya layanan jaringan pengelolaan air limbah yang memenuhi standar layak dan aman	1	1	1	1	1	1	100
9	Masih belum optimalnya penanganan infrastruktur jalan lingkungan dan kawasan strategis yang tertangani	1	1	1	1	1	1	100
10	Sebagian besar bangunan pemerintah dan lingkungannya merupakan bangunan yang memerlukan penanganan peningkatan dan rehabilitasi	1	1	1	1	1	0	75

11	Masih belum optimalnya fungsi jaringan drainase perkotaan yang terpelihara dan saling terintegrasi	1	1	1	1	1	1	100
12	Kualitasnya pelaku usaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an masih rendah	1	1	1	1	1	1	100
13	Mutu sumber daya manusia sektor jasa konstruksi masih dibawah standar dan masih banyak tenaga kerja yang belum disertifikasi .	1	1	1	1	1	0	75
14	Minimnya regulasi perencanaan tata ruang yang dapat dijadikan Instrumen pengendalian tata ruang	1	1	1	1	1	1	100
15	Sumberdaya manusia yang terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum/optimal	1	1	1	1	1	0	75
16	Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja	1	1	1	1	1	0	75
17	Belum optimalnya database prasarana, sarana, dan utilitas serta prasarana dan sarana dasar kegiatan di semua bidang sehingga pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan serta tidak tersusun secara sistematis dan akurat	1	1	1	1	1	0	75
Total		17	17	17	17	15	13	

Berdasarkan perhitungan di atas, maka isu-isu strategis yang akan ditangani melalui renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Jaringan irigasi masih memerlukan penanganan dan belum optimalnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas berdampak langsung pada sektor pertanian pada khususnya
2. Penambahan dan peningkatan kapasitas jalan yang ada tidak sebanding dengan laju pertumbuhan lalu lintas serta kondisi fisik ruas jalan dan jembatan yang kurang memadai sangat berpengaruh pada keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa ke Pusat Perekonomian masyarakat
3. Masih belum optimalnya layanan penyediaan akses Sistem Pengolahan Air Minum yang aman terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
4. Masih rendahnya layanan jaringan pengelolaan air limbah yang memenuhi standar layak dan aman.

5. Masih belum optimalnya penanganan infrastruktur jalan lingkungan dan kawasan strategis yang tertangani.
6. Kurangnya partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an serta mutu sumber daya manusia sektor jasa konstruksi masih dibawah standar dan masih banyak tenaga kerja yang belum disertifikasi.
7. Sebagian besar bangunan pemerintah dan lingkungannya merupakan bangunan yang memerlukan penanganan peningkatan dan rehabilitasi.
8. Minimnya regulasi perencanaan tata ruang yang dapat dijadikan Instrumen pengendalian tata ruang.
9. Kasus sengketa pertanahan masih tinggi dan proses fasilitasi sertifikasi tanah aset milik Kabupaten Banjar berlangsung lama sehingga banyak aset yang belum bersertifikat.
10. SKPD yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang didukung dokumen feasibility studi untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah.
11. Terdapat kawasan hutan yang sudah dikuasai masyarakat serta dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini perlu penegasan kepastian hukum kepemilikan.
12. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya Pemerintah Daerah dan Desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan pertanahan.



B A B

Perubahan Rencana Strategis

4

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Banjar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.I TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka mewujudkan janji-janji politik kepada masyarakat Kabupaten Banjar ketika proses pemilihan kepala daerah. Sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Banjar, Dinas PUPRP berkewajiban menyusun Renstra guna mendukung program Bupati Banjar dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra DPUPRP memuat visi dan sebagian misi Kepala Daerah yang sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas PUPRP, serta memuat berbagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan yang disertai indikator target dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Banjar yang merupakan upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ **Maju** dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).
- ✓ **Mandiri** dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.

- ✓ **Agamis** dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas PUPRP Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas PUPRP Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas PUPRP yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Ditinjau dari urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas PUPRP berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati lima misi pembangunan daerah tersebut, maka peran Dinas PUPRP terdapat pada misi dua, tiga dan keempat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan.

Tujuan daerah yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026, yaitu:

1. Tujuan misi pertama: terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Tujuan misi kedua:
 - Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas.
 - Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran.
3. Tujuan misi ketiga: terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
4. Tujuan misi keempat: terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Tujuan misi kelima: terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur.

Dari kelima tujuan misi Kabupaten Banjar di atas, yang berkesesuaian dengan urusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, meliputi tujuan misi kedua dan tujuan misi ketiga, maka yang menjadi tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yaitu :

1. Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas;
2. Terwujudnya penurunan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran;
3. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan;
4. Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif.

Sasaran-sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan daerah yang termuat dalam RPJMD periode 2021-2026, maka sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

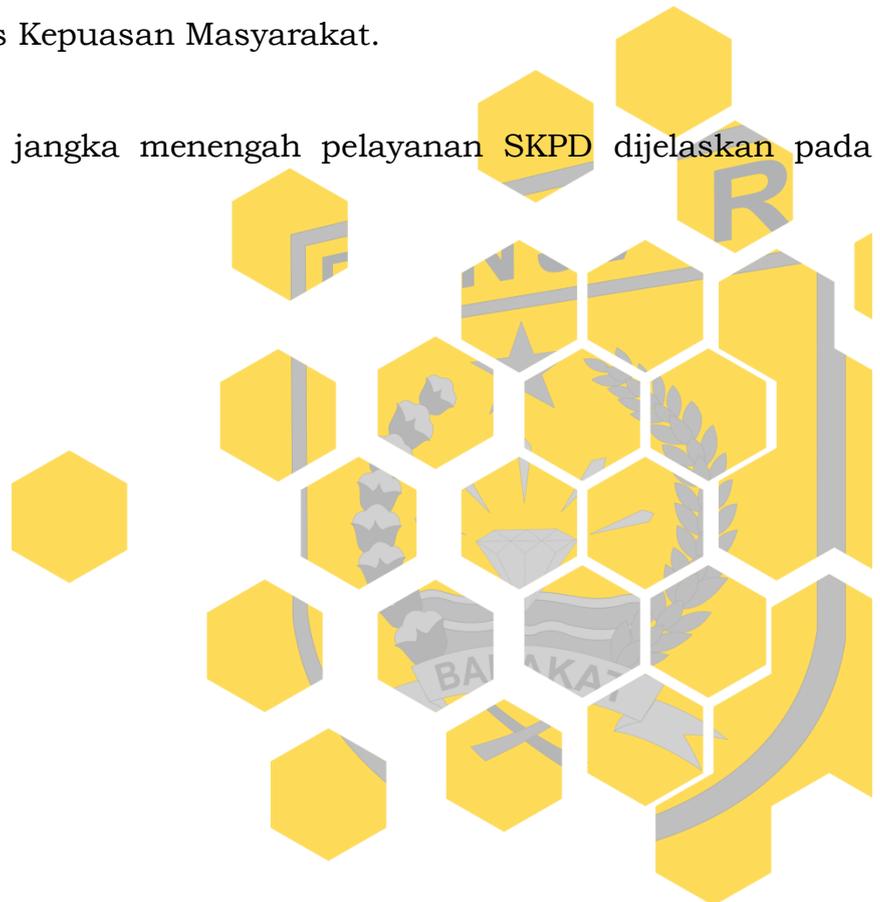
1. Sasaran dari tujuan pertama misi kedua, yaitu: meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Sasaran dari tujuan kedua misi kedua : Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah.

3. Sarasan dari tujuan misi ketiga, yaitu: Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah.
4. Sasaran dari tujuan misi keempat, yaitu: Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik.

Kemudian berdasarkan sasaran RPJMD diturunkan kedalam sasaran SKPD dengan memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi urusan SKPD yang kemudian menjadi kinerja utama SKPD. Adapun sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Dan Konektivitas Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator sasaran, yaitu: Persentase Prasarana Konektivitas
2. Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan indikator sasaran, yaitu: Indeks Jaringan Infrastruktur, dan Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi
3. Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah dengan indikator sasaran, yaitu: Ketaatan Terhadap RTRW.
4. Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik dengan indikator sasaran, yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD dijelaskan pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -										
No	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Dan Konektivitas yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Konektivitas Kabupaten	Persentase Prasarana Konektivitas	%	98,73	98,73	98,83	98,85	98,87	98,88
2	Meningkatnya Infrastruktur Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten	Indeks Jaringan Infrastruktur	%	73,09	73,25	77,56	86,10	86,98	87,80
			Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	%	84,00	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00
3	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Ketertiban Ruang Dan Bangunan	Ketaatan Terhadap Rtrw	%	94,505	94,512	94,519	94,526	94,533	94,54
4	Meningkatnya Kualitas Dan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggara Nya Reformasi Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,26	84,00	85,00	86,50	87,00	88,31

B A B

Perubahan Rencana Strategis

5

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Banjar

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.I PERUMUSAN STRATEGI

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada Bab IV, dapat dijabarkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada periode 2021 – 2026, yaitu:



Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya konektivitas Kabupaten	Meningkatkan kondisi jalan kabupaten dan jembatan yang mantap	peningkatan infrastruktur jalan kabupaten dan jembatan serta konektivitas antar wilayah dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan baru - Rekonstruksi jalan - Pemeliharaan jalan - Pembangunan jembatan - Rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan - Pemeliharaan jembatan
2	Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan wilayah	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Kabupaten	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas guna mendukung pertanian dan perlindungan sumber daya air Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang	Pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Air dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan normalisasi sungai - Melakukan pembangunan, restorasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa Pengembangan SPAM kabupaten dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Perkotaan - Menyediakan SPAM jaringan perpipaan untuk kawasan perdesaan yang belum mendapatkan layanan air minum - Perbaiki dan pemeliharaan SPAM yang sudah terbangun

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dilakukan secara bertahap	
			Mengembangkan pelayanan infrastruktur air limbah dan pengurangan jamban terapung	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan pengolahan limbah dengan system setempat dan domestic - Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat - Pemeliharaan dan operasionalisasi pengolahan limbah yang sudah terbangun - Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman - Pengurangan jumlah jamban terapung dengan melibatkan beberapa stakeholder dan pemangku kepentingan
			Mengembangkan sistem drainase di kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan saluran drainase primer, sekunder dan tersier	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sistem pengelolaan drainase yang berwawasan lingkungan. - Mengoptimalkan dan memelihara saluran drainase yang ada - Mendorong & memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan sistem drainase yang efektif, efisien dan berkelanjutan
			Meningkatkan dan mengembangkan kualitas permukiman dan kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan serta penetapan skala prioritas penanganan serta perbaikan kawasan strategis kabupaten - Melakukan pemeliharaan infrastruktur kawasan strategis
			Meningkatnya Bangunan	Pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan negara dengan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Negara dan Lingkungannya yang representatif	memperhatikan skala prioritas
			Meningkatkan kondisi jalan poros desa yang mantap	peningkatan infrastruktur jalan untuk memudahkan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara melakukan rehabilitasi jalan poros desa
			Meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyedia jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan sosialisasi/bimtek/desiminasi tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. - Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan tenaga kerja Jasa Konstruksi
			Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan fasilitas kerja yang memadai agar berdaya guna dan berhasil guna - Penyediaan administrasi penunjang SKPD - Penyediaan jasa penunjang SKPD - Pemeliharaan BMD berupa mobil jabatan, kendaraan dinas, peralatan gedung/dinas, alat berat - Peningkatan kualitas SDM - Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu dan akuntabel - Penyediaan administrasi keuangan SKPD
3	Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah	Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Penyusunan kebijakan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang disertai dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruangnya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW kabupaten beserta rencana rinci tata ruang - Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk di dalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang

V.II EVALUASI PENENTUAN LANGKAH STRATEGIS

Untuk memfokuskan strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*). Faktor-Faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari kekuatan, kelemahan, tantangan dan kendala yang ada.

Hal tersebut juga dilengkapi dengan sumber daya, sarana prasarana, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta dana. Salah satu instrumen yang digunakan Pengukuran Kinerja dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah Analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*). Secara efektif analisa SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah dan menganalisa lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimal kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman(*Threats*).

Empat komponen yang selalu dimiliki oleh organisasi adalah kekuatan (*stengths*) dan kelemahan (*weakness*) secara eksternal dengan analisa swot, dapat diidentifikasi setiap potensi, peluang, kekuatan, kendala dan kelemahan suatu organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif efisien. Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Succes Factor*).

Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan organisasi. Sebaiknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Matriks analisa lingkungan intern (kekuatan dan kelemahan) dan analisa lingkungan ekstern (peluang dan ancaman) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Analisa Lingkungan

IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL			
Strenghts		Weakness	
S1	Adanya dukungan dan komitmen pimpinan	W1	Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
S2	Suasana kerja kondusif	W2	Sarana prasarana pendukung masih belum optimal
S3	Tersedianya staf pendukung pelaksanaan kegiatan	W3	SDM yang berkualifikasi teknis manajerial masih terbatas
IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL			
Oppotunities		Threats	
O1	Kondisi keamanan daerah yang relatif stabil	T1	Kondisi alam yang kurang mendukung
O2	Kepercayaan dan dukungan dari Pimpinan Daerah serta stakeholders	T2	Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap ketersediaan infrastruktur ke PU-an
O3	Pengembangan pengetahuan dan kemampuan pegawai	T3	Kurangnya partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an

Upaya untuk mencapai keadaan kinerja yang diinginkan pada dasarnya akan menghadapi hambatan-hambatan yang memerlukan penanganan. Untuk ini dilakukan penilaian tingkat urgensi tiap faktor yaitu dengan metode komparasi urgensi atau komparansi faktor.

Untuk menentukan faktor yang menjadi kebutuhan dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu mengkondisikan faktor-faktor terhadap setiap faktor yang teridentifikasi. Setiap faktor dianggap penting terhadap pencapaian tujuan dan sasaran apabila memiliki nilai lebih dari faktor yang lain. Berikut ini akan digambarkan matrik urgensi faktor internal dan eksternal dalam bentuk tabel.

Tabel 5.3
Komparasi Urgensi Faktor Internal

NO.	FAKTOR PENDORONG	TINGKAT KOMPARASI URGENSI FAKTOR							NU	BOBOT F. / BF
		STRENGTHS / KEKUATAN	a	b	c	d	e	f		
a.	Adanya dukungan dan komitmen pimpinan		b	a	a	a	a	4	26,67	
b.	Suasana kerja kondusif	b		c	b	b	b	4	26,67	
c.	Tersedianya staf pendukung pelaksanaan kegiatan	a	c		d	c	c	3	20,00	
	WEAKNESS/ (KELEMAHAN)									
d.	Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	a	b	d		d	f	2	13,33	
e.	Sarana prasarana pendukung masih belum optimal	a	b	c	d		e	1	6,67	
F	SDM yang berkualifikasi teknis manajerial masih terbatas	a	b	c	f	e		1	6,67	
	Jumlah	4	4	3	2	1	1	15	100,00	

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa kekuatan internal yang mempunyai nilai urgensi tertinggi adalah **adanya dukungan dan komitmen pimpinan** dan **suasana kerja kondusif** dengan nilai BF **26,67** dan kelemahan internalnya yaitu **terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan** dengan nilai BF terbesar **13,33**.

Tabel 5.4
Komparasi Urgensi Faktor Eksternal

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	TINGKAT KOMPARASI URGENSI FAKTOR							NU	BOBOT F. / BF
		OPPORTUNITIES/PELUANG	a	b	c	d	e	f		
a.	Kondisi keamanan daerah yang relatif stabil		b	a	a	a	a	4	26,67	
b.	Kepercayaan dan dukungan dari Pimpinan Daerah serta stakeholders	b		b	b	b	f	4	26,67	
c.	Pengembangan pengetahuan dan kemampuan pegawai	a	b		c	e	f	1	6,67	
	THREATS/ANCAMAN									

d.	Kondisi alam yang kurang mendukung	a	b	c	e	d	1	6,67
e.	Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap ketersediaan infrastruktur ke PU-an	a	b	e	e	e	3	20,00
f	Kurangnya partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an	a	f	f	d	e	2	13,33
		4	4	1	1	3	2	15
								100,00

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa peluang eksternal yang mempunyai nilai urgensi tertinggi adalah **kondisi keamanan daerah yang relatif stabil dan kepercayaan dan dukungan dari Pimpinan Daerah serta stakeholders** dengan nilai BF **26,67** dan ancaman eksternalnya yaitu **tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap ketersediaan infrastruktur ke PU-an** dengan nilai BF terbesar **20,00**.

Komparansi antara faktor ini menunjukkan kepentingan atau kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Faktor yang telah dikomparansi dengan faktor lainnya dan mempunyai nilai Nilai Urgensi (NU) yang tinggi, menunjukkan bahwa faktor tersebut mempunyai kepentingan pengaruh yang tinggi untuk mencapai tujuan atau sasaran. Sebaliknya nilai NU yang kecil menunjukkan rendahnya urgensi faktor tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hasil nilai NU dari setiap faktor ini akan menghasilkan Bobot Faktor (BF) dari setiap faktor.

V.III STRATEGI MENGATASI KENDALA

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan strategi untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu strategi kunci keberhasilan agar terjadi sinergi. Manfaat sinergi adalah untuk mengoptimalkan sumber daya dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kinerja. Dalam kaitan dengan menyusun strategi, dilakukan pendekatan formulasi strategi SWOT baik secara internal maupun eksternal sebagaimana tersaji dalam

diagram 4.1. Dari matrik ini terlihat beberapa asumsi alternatif strategi yang dapat dilakukan, yakni sebagai berikut :

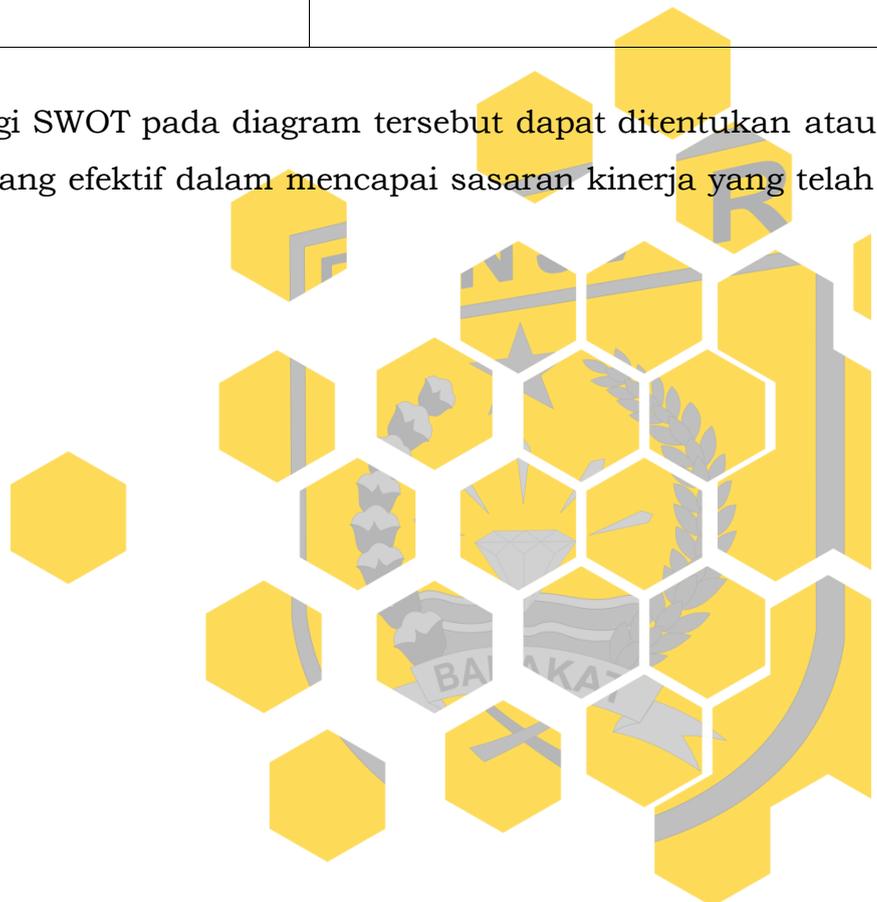
1. Strategi *Strength-Opportunity*, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang.
2. Strategi *Weakness-Opportunity*, yaitu meminimalkan kelemahan untuk mencapai dan memanfaatkan peluang yang ada.
3. Strategi *Strength-Threat*, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi ancaman.
4. Strategi *Weakness-Threat*, yaitu, yaitu taktik untuk bertahan yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan internal serta menghindari di ancaman-ancaman lingkungan luar.

Tabel 5.5
Formulasi Strategi SWOT

INTERNAL	<p>KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan 2. Suasana kerja kondusif 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 2. SDM yang berkualifikasi teknis manajerial masih terbatas
EKSTERNAL	<p>PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan dan dukungan dari Pimpinan Daerah serta stakeholders 2. Kondisi keamanan daerah yang relatif stabil 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari Pimpinan Daerah serta stakeholders 2. Memanfaatkan suasana kerja kondusif untuk mendukung kondisi keamanan daerah tetap relatif stabil
		<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimalkan kepercayaan dan dukungan dari Pimpinan Daerah serta stakeholders agar keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan teratasi 2. Optimalkan kondisi keamanan daerah yang relatif stabil walaupun SDM yang berkualifikasi teknis manajerial masih terbatas

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S) 1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan 2. Suasana kerja kondusif	KELEMAHAN (W) 1. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 2. SDM yang berkualifikasi teknis manajerial masih terbatas
ANCAMAN (T) 1. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap ketersediaan infrastruktur ke PU-an 2. Kurangnya partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an	STRATEGI ST 1. Maksimalkan dukungan dan komitmen pimpinan untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap ketersediaan infrastruktur ke PU-an 2. Manfaatkan suasana kerja kondusif untuk memacu partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an	STRATEGI WT 1. Minimalkan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dengan penyusunan prioritas tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur ke PU-an 2. Peningkatan SDM yang berkualifikasi teknis manajerial untuk memacu partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an.

Dari formulasi strategi SWOT pada diagram tersebut dapat ditentukan atau dipilih alternatif strategi yang efektif dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.



B A B

Perubahan Rencana Strategis

6

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN

VI.I PENGANTAR

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar 2021 - 2026 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah penyelenggaraan urusan wajib Pekerjaan Umum yang terdiri dari 6 (enam) bidang yang mempunyai kegiatan wajib yaitu bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, dan Pertanahan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di 6 bidang tersebut, Sekretariat juga berperan penting dalam memberikan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

VI.II RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi				Indeks Konektivitas	65,53%	68,28%	22.666.938.897	72,70%	125.074.591.931	75,46%	74.126.203.240	78,21%	207.455.652.727	80,96%	211.604.765.782	80,96%	640.928.152.577	Bupati	Kabupaten Banjar
Meningkatnya Konektivitas Kabupaten				Persentase Prasarana Konektivitas	98,73%	98,73%	22.666.938.897	98,83%	125.074.591.931	98,85%	74.126.203.240	98,87%	207.455.652.727	98,87%	211.604.765.782	98,88%	640.928.152.577	Kepala Dinas	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	1	03	10			22.666.938.897	73,12%	125.074.591.931	79,14%	74.126.203.240	81,03%	207.455.652.727	82,95%	211.604.765.782	82,95%	640.928.152.577	Kepala Bidang Bina Marga	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap					0,70%	22.666.938.897	1,86%	125.074.591.931	1,86%	74.126.203.240	1,86%	207.455.652.727	1,86%	211.604.765.782	1,86%	640.928.152.577	Kepala Bidang Bina Marga	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya jembatan dalam kondisi baik	1	03	10	2.01	79,89%		81,35%		89,84%		91,47%		93,22%		94,97%			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	1	3	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		14 Dokumen	1.200.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	14 Dokumen	1.200.000.000		- Kepala Seksi Jalan Kabupaten - Kepala Seksi Jalan Desa - Kepala Seksi Jembatan	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		N/A	-	73 Dokumen	9.849.925.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	73 Dokumen	9.849.925.000			Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1	3	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		N/A	-	N/A	-	72 Dokumen	2.687.800.000	78 Dokumen	5.725.360.000	78 Dokumen	5.839.867.200	229 Dokumen	14.253.027.200		
	Tergantinya Jembatan	1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian (meter)		6 Meter	1.000.000.000	40 Meter	858.050.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	46 Meter	1.858.050.000		
	Tergantinya Jembatan	1	3	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti		N/A	-	N/A	-	3 Jembatan	7.152.560.000	5 Jembatan	10.500.310.000	5 Jembatan	10.710.316.200	13 Jembatan	28.363.186.200		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terbangunnya Jalan	1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (km)		4 KM	4.000.000.000	20 KM	5.426.915.920	N/A	-	N/A	-	N/A	-	24 KM	9.426.915.920	Kepala Seksi Jalan Kabupaten	Kabupaten Banjar
	Terbangunnya Jalan	1	3	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		N/A	-	N/A	-	3,5 KM	3.600.550.000	3,5 KM	6.748.010.000	3,5 KM	6.882.970.200	10,5 KM	17.231.530.200		
	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		1 KM	2.000.000.000	20 KM	46.796.386.600	N/A	-	N/A	-	N/A	-	21 KM	48.796.386.600	Kepala Seksi Jalan Kabupaten	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terekonstruksinya Jalan	1	3	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		N/A	-	N/A	-	10 KM	16.810.480.000	1 KM	143.693.508.000	1 KM	146.567.378.160	12 KM	307.071.366.160		
	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala		1 KM	1.000.000.000	2 KM	7.836.965.700	N/A	-	N/A	-	N/A	-	3 KM	8.836.965.700		
	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	1	3	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		N/A	-	N/A	-	2 KM	3.635.230.000	2 KM	1.815.250.000	2 KM	1.851.555.000	6 KM	7.302.035.000		
																						Kepala Seksi Jalan Kabupaten	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (meter)		7 Meter	1.100.000.000	150 Meter	1.687.192.290	N/A	-	N/A	-	N/A	-	157 Meter	2.787.192.290	Kepala Seksi Jembatan	Kabupaten Banjar
	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	1	3	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		N/A	-	N/A	-	24 Jembatan	6.198.405.000	12 Jembatan	5.622.965.000	12 Jembatan	5.735.424.300	48 Jembatan	17.556.794.300		
	Terehabilitasinya Jembatan	1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (meter)		12 Meter	2.166.938.897	150 Meter	7.093.492.500	N/A	-	N/A	-	N/A	-	162 Meter	9.260.431.397	Kepala Seksi Jembatan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terehabilitasinya Jembatan	1	3	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		N/A	-	N/A	-	18 Jembatan	8.278.253.878	7 Jembatan	9.255.433.878	7 Jembatan	9.440.542.556	32 Jembatan	26.974.230.311,56		
	Terbangunnya Jembatan	1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun (meter)		10 Meter	4.000.000.000	10 Meter	19.734.190.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	20 Meter	23.734.190.000		
	Terbangunnya Jembatan	1	3	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		N/A	-	N/A	-	7 Jembatan	11.353.660.000	3 Jembatan	11.042.620.000	3 Jembatan	11.263.472.400	13 Jembatan	33.659.752.400	Kepala Seksi Jembatan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan	1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan	5 Dokumen	500.000.000	9 Dokumen	922.800.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	14 Dokumen	1.422.800.000	-	Kepala Seksi Jalan Kabupaten	Kabupaten Banjar
	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	1	3	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	N/A	-	N/A	-	1.907,25 KM	835.400.000	1.898 KM	847.760.000	1.898 KM	864.715.200	5.703,25 KM	2.547.875.200	-	-	
	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (km)	4 KM	4.000.000.000	10 KM	9.125.521.403	N/A	-	N/A	-	N/A	-	14 KM	13.125.521.403	-	Kepala Seksi Jalan Kabupaten	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	1	3	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		N/A	-	N/A	-	10 KM	13.573.864.362	10 KM	12.204.435.849	10 KM	12.448.524.566	30 KM	38.226.824.776,98		
	Terehabilitasinya/ Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana		1,7 KM	1.600.000.000	1,7 KM	9.367.007.018	N/A	-	N/A	N/A	-	-	3,4 KM	10.967.007.018	- Kepala Seksi Jalan Kabupaten - Kepala Seksi Jalan Desa - Kepala Seksi Jembatan	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Penggantian/ Rehabilitasi Jembatan Gantung	1	03	10	2.01	27	Penggantian/ Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/ Direhabilitasi (unit)		1 Unit	100.000.000	2 Unit	6.376.145.500	N/A	-	N/A	-	-	-	3 Unit	6.476.145.500	Kepala Seksi Jembatan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah				Indeks Infrastruktur	73,09%	73,25%	41.961.998.014	74,74%	151.509.842.926	76,14%	89.497.327.869	77,41%	141.985.402.722	78,82%	144.825.110.776	78,82%	569.779.682.307	Bupati	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten			Indeks Jaringan Infrastruktur	73,09%	73,25%	41.961.998.014	77,56%	151.509.842.926	86,10%	89.497.327.869	86,98%	141.985.402.722	87,80%	144.825.110.776	87,80%	569.779.682.307	Kepala Dinas	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	10306		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	46,97%	45,98%	1.959.067.530	48,68%	12.490.364.564	50,45%	11.140.977.198	51,62%	9.708.052.569	53,09%	9.902.213.620	53,09%	45.200.675.481	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	1	03	06	2.01	0027	Penyusunan Outline Plan Pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan Yang Disusun Outline Plannya		N/A	-	N/A	-	N/A	-	25 Kawasan Genangan	106.150.000	25 Kawasan Genangan	108.273.000	50 Kawasan Genangan	214.423.000	Kepala Seksi Drainase	Kabupaten Banjar
	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan	1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi		N/A	-	500 Meter	1.234.510.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	500 meter	1.234.510.000	Kepala Seksi Drainase	Kabupaten Banjar
	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		N/A	-	N/A	-	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.438.662.781	3 Sistem Drainase Perkotaan	317.009.998	3 Sistem Drainase Perkotaan	323.350.198	8 Sistem Drainase Perkotaan	2.079.022.976,96		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun		N/A	-	9.000 Meter	8.880.146.464	N/A	-	N/A	-	N/A	-	9.000 meter	8.880.146.464		
	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang Terbangun		2.900 meter	1.007.342.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2.900 meter	1.007.342.000		
	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		N/A	-	N/A	-	6 Sistem Drainase Perkotaan	7.241.755.717	6 Sistem Drainase Perkotaan	7.077.793.571	6 Sistem Drainase Perkotaan	7.219.349.442	18 Sistem Drainase Perkotaan	21.538.898.730,42		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Yang Disusun		N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	178.600.000	3 Dokumen	182.172.000	5 Dokumen	360.772.000	Kepala Seksi Drainase	Kabupaten Banjar
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase	1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang dioperasikan dan dipelihara		40.000 Meter	951.725.530	45.000 Meter	1.583.958.100	N/A	-	N/A	-	N/A	-	85.000 Meter	2.535.683.630	Kepala Seksi Drainase	Kabupaten Banjar
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		N/A	-	N/A	-	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.586.248.700	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.598.920.000	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.630.898.400	4 Sistem Drainase Perkotaan	4.816.067.100		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	0,50%	1.000.000.000	3,24%	6.218.548.163	2,31%	4.594.678.163	1,75%	4.272.090.694	1,75%	4.357.532.508	1,75%	20.442.849.528		Kepala Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Banjar
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	1	03	02	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai		N/A	-	6 KM	1.162.466.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	6 KM	1.162.466.000		Kepala Seksi Sungai dan Sumber Air Baku	Kabupaten Banjar
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai		N/A	-	N/A	-	10 KM	238.556.000	7 KM	1.236.681.000	7 KM	1.261.414.620	24 KM	2.736.651.620			Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		2,728 Km	1.000.000.000	15 KM	2.116.436.500	N/A	-	N/A	-	N/A	-	17,728 KM	3.116.436.500	Kepala Seksi Sungai dan Sumber Air Baku	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		N/A	-	N/A	-	2,5 KM	2.186.026.500	0,1 KM	512.950.000	0,1 KM	523.209.000	3,5 KM	3.222.185.500		
	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		N/A	-	1 KM	2.258.011.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 KM	2.258.011.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		N/A	-	N/A	-	0,15 KM	1.756.061.000	0,5 KM	1.900.358.031	0,5 KM	1.938.365.192	1,15 KM	5.594.784.222,62			
	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		N/A	-	1 Dokumen	211.040.000	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	-	1 Dokumen	211.040.000		
	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		N/A	-	N/A	-	1 Dokumen	210.240.000	1 Dokumen	297.047.000	1 Dokumen	302.987.940	3 Dokumen	810.274.940			
																						Kepala Seksi Sungai dan Sumber Air Baku	Kabupaten Banjar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun		N/A	-	7 Dokumen	259.594.663	N/A	-	N/A	-	N/A	-	7 Dokumen	259.594.663		
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		N/A	-	N/A	-	3 Dokumen	203.794.663	1 Dokumen	203.794.663	1 Dokumen	207.870.556	5 Dokumen	615.459.882,26		
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		N/A	-	4 Dokumen	211.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	4 Dokumen	211.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 Dokumen	121.260.000	1 Dokumen	123.685.200	2 Dokumen	244.945.200		
	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	N/A	7,89%	1.103.129.550	55,79%	5.671.470.000	69,721%	4.515.500.000	76,083%	11.377.582.000	82,445%	11.605.133.640	82,445%	34.272.815.190	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Banjar
	Terbangunnya Bendung Irigasi	1	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun		N/A	-	9 Bendung	1.496.880.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	9 Bendung	1.496.880.000	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terbangunnya Bendung Irigasi	1	03	02	2.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun		N/A	-	N/A	-	3 Bendung	753.800.000	3 Bendung	584.614.000	3 Bendung	596.306.280	9 Bendung	1.934.720.280		
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Irigasi dan Rawa Dibangun		8,98 KM	451.887.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	8,98 KM	451.887.000		
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	1	03	02	2.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi		N/A	-	N/A	-	29,632 KM	-	14 KM	6.719.217.000	14 KM	6.853.601.340	51,632 KM	13.572.818.340	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara		3 KM	651.242.550	16,95 KM	3.969.190.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	19,95 KM	4.620.432.550	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa	Kabupaten Banjar
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	1	03	02	2.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara		N/A	-	N/A	-	14 KM	3.598.600.000	14 KM	3.486.391.000	17 KM	3.556.118.820	45 KM	10.641.109.820		
	Kelembagaan Pengelola Irigasi yang mendapatkan Operasionalisasi	1	03	02	2.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi		N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Lembaga	422.420.000	2 Lembaga	430.868.400	4 Lembaga	853.288.400	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa	Kabupaten Banjar
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		N/A	-	2 Dokumen	205.400.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	205.400.000	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	163.100.000	3 Dokumen	164.940.000	2 Dokumen	168.238.800	7 Dokumen	496.278.800		
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum layak	79,52%	80,57%	6.314.782.925	85,11%	24.463.431.581	100,00%	6.778.956.950	100,00%	17.239.191.300	100,00%	17.583.975.126	100,00%	72.380.337.882	Kepala Bidang Cipta Karya	Kabupaten Banjar
								Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman		16,72%		17,98%		18,17%		18,35%		18,53%					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Jaringan SPAM Kabupaten	N/A	1,05%	6.314.782.925	1,57%	24.463.431.581	1,60%	6.778.956.950	1,66%	17.239.191.300	1,72%	17.583.975.126	1,72%	72.380.337.882	Kepala Bidang Cipta Karya	Kabupaten Banjar
	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	N/A	-	-	N/A	-	1.000 Unit SR	4.314.869.200	N/A	-	N/A	-	1.000 Unit	4.314.869.200		Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		1 Liter/ Detik	484.886.681	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 Liter/ Detik	484.886.680,56	Kepala Seksi Air Minum	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase Sambungan Rumah yang Terlayani Air Minum	1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Sambungan Rumah yang Terlayani Air Minum	1019 unit SR	4.092.368.652	2.214 Unit SR	16.905.958.975	N/A	-	N/A	-	N/A	-	3233 unit SR	20.998.327.627,48		
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	N/A	-	N/A	-	N/A	-	7,5 Liter/Detik	10.175.667.000	7,5 Liter/Detik	10.379.180.340	15 Liter/Detik	20.554.847.340		
	Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang Diperbaiki	1	03	03	2.01	08	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang Sarana Air Minumnya akan dilakukan optimalisasi dan perluasan	8 Desa	1.227.648.195	8 Desa	2.012.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	16 Desa	3.239.648.195,03	Kepala Seksi Air Minum	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terfasilitasinya Penyiapan Kerjasama SPAM	1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah Unit SPAM yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama		8 Unit	378.345.662	8 Unit	443.867.711	N/A	-	N/A	-	N/A	-	16 Unit	822.213.372,74	Kepala Seksi Air Minum	Kabupaten Banjar
	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama		N/A	-	N/A	-	8 Unit	443.867.750	8 Unit	445.248.000	8 Unit	454.152.960	24 Unit	1.343.268.710		
	Terpeliharanya SPAM Berbasis Masyarakat	1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Unit SPAM Berbasis Masyarakat yang Mendapatkan Operasi dan Pemeliharaan		1 unit	131.533.735	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 Unit	131.533.735,18		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi		N/A	-	N/A	-	8 Unit	2.020.220.000	8 Unit	2.034.920.000	8 Unit	2.075.618.400	24 Unit	6.130.758.400	Kepala Seksi Air Minum	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Sambungan Rumah SPAM	1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang		N/A	-	350 SR	5.101.604.895	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	350 SR	5.101.604.895	Kepala Seksi Air Minum	Kabupaten Banjar
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan yang Mendapatkan Perluasan	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		N/A	-	N/A	-	500 SR	-	500 SR	4.583.356.300	500 SR	4.675.023.426	1.500 SR	9.258.379.726		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	03	05																
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	61,57 %	76,74%	83,12%	12.828.317.381	100,00%	5.300.820.000	100,00%	14.008.464.800	100,00%	14.288.634.09	100,00%	49.792.163.624	Kepala Bidang Cipta Karya	Kabupaten Banjar
						Persentase Akses Sanitasi Aman	N/A	7,63%	8,94%	12.828.317.381	9,81%	5.300.820.000	10,10%	14.008.464.800	10,30%	14.288.634.09	10,30%	49.792.163.624	Kepala Bidang Cipta Karya	Kabupaten Banjar
						Persentase Akses Sanitasi Layak	61,57 %	76,74%	83,12%	12.828.317.381	100,00%	5.300.820.000	100,00%	14.008.464.800	100,00%	14.288.634.096	100,00%	49.792.163.624	Kepala Bidang Cipta Karya	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	1	03	05	2.01															
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Sanitasi Layak	61,57 %	76,74%	83,12%	12.828.317.381	100,00%	5.300.820.000	100,00%	14.008.464.800	100,00%	14.288.634.096	100,00%	49.792.163.624	Kepala Bidang Cipta Karya	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							Persentase Akses Sanitasi Aman	N/A	7,63%		8,94%		9,81%		10,10%		10,30%		10,30%					
	Terbangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	1	03	05	2.01	06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	88 Rumah Tangga	2.431.147.497	200 Rumah Tangga	11.507.717.381	N/A	-	N/A	-	N/A	-	491 Rumah Tangga	13.938.864.878	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman	Kabupaten Banjar		
	Tersedianya Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	2 Unit	242.550.000	2 Unit	356.450.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	4 Unit	599.000.000	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman	Kabupaten Banjar		
	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	N/A	-	N/A	-	N/A	356.450.000	1 Unit	356.450.000	1 Unit	363.579.000	2 Unit	1.076.479.000	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman	Kabupaten Banjar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara		1	207.229.850	1	251.500.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	6	458.729.850	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman	Kabupaten Banjar
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD)	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		N/A	-	N/A	1	251.500.000	1	491.782.300	1	501.617.946	3	1.244.900.246			
	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		N/A	-	N/A	500	3.987.320.000	500	12.378.002.500	500	12.625.562.550	1.500	28.990.885.050			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		12 KPP	485.000.000	12 Kelompok	712.650.000	N/A	-	N/A	N/A	-	39 Kelompok	1.197.650.000			
	Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		N/A	-	N/A	-	500 Orang	705.550.000	500 Orang	782.230.000	500 Orang	797.874.600	1.500 Orang	2.285.654.600		
	Meningkatnya Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	N/A	83,41%	7.764.813.064	84,57%	14.431.877.221	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	22.196.690.285		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi						
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD									
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
	Meningkatnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	1	03	07	2.01			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	N/A	83,41%	7.764.813.064	84,57%	14.431.877.221	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	22.196.690.285	N/A	Kepala Bidang Cipta Karya	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah	1	03	07	2.01	01		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		1.694,78 m2 (Sistem Jaringan Jalan)	2.155.835.834	2.795 m2 (Sistem Jaringan Jalan)	6.361.826.838	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	8.517.662.672,39	1.697,575 m2 (Sistem Jaringan Jalan)	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
	Terpeliharanya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		9.411,49 m2 (Sistem Jaringan Jalan)	5.608.977.230	9.000 m2 (Sistem Jaringan Jalan)	8.070.050.383	N/A	-	N/A	-	N/A	-	18.411,49 m2 (Sistem Jaringan Jalan)	13.679.027.612,61	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Kabupaten Banjar	
	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan Penataan	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	100%	78%	5.342.985.000	88,93%	23.289.078.188	89,29%	31.978.935,55	89,64%	48.836.138.719	90,00%	49.812.861.493	159.259.998.958	90,00%	87,58%	Kepala Bidang Cipta Karya	Kabupaten Banjar
								Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai		N/A	-	N/A	-	85,54%	86,52%									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Meningkatnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	1	03	09	2.01													159.259.998.958	Kepala Bidang Cipta Karya	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata dengan baik																			
	Terpeliharanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1	03	09	2.01	04												17.997.159.718,23	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		3 Dokumen	220.114.098	9 Dokumen	904.450.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	12 Dokumen	1.124.564.097,60		
	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		N/A	-	N/A	-	7 Dokumen	387.069.900	5 Dokumen	960.528.100	5 Dokumen	979.738.662	17 Dokumen	2.327.336.662	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi																	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD																				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																	
	Tercatatnya Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1	03	09	2.01	03			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		2	Kawasan	1.358.034.132		2	Kawasan	8.152.305.240		N/A	-	N/A	-	N/A	-	4	Kawasan	9.510.339.372,17		Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Kabupaten Banjar					
	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1	03	09	2.01	0008			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		N/A		-		N/A		-		3	Kawasan	31.591.865.658		3	Kawasan	47.875.610.619		3	Kawasan	48.833.122.831		9	Kawasan	128.300.599.108,38		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	71.95%	72.27%	15.111.292.598	73,47%	52.116.755.828	76,47%	25.187.460.000	77,81%	36.543.882.640	79,16%	37.274.760.293	79,16%	166.234.151.359	Kepala Bidang Bina Marga	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	N/A	1,20%	15.111.292.598	1,20%	52.116.755.828	1,20%	25.187.460.000	1,20%	36.543.882.640	1,20%	37.274.760.293	1,20%	166.234.151.359	Kepala Bidang Bina Marga	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		14 KM	15.111.292.598	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	14 KM	15.111.292.598	Kepala Seksi Jalan Desa	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		N/A	-	150 Meter	52.116.755.828	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	-	150 Meter	52.116.755.828		
	Terehabilitasinya Jalan	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		N/A	-	N/A	-	22 KM	25.187.460.000	22 KM	36.543.882.640	22 KM	37.274.760.293	66 KM	99.006.102.932,80			
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Kabupaten							Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	84,00%	87,00%	413.044.100	87,50%	269.696.000	88,00%	813.593.300	88,50%	517.933.850	89,00%	528.292.527	89,00%	2.542.559.777	Kepala Dinas	Kabupaten Banjar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		135 Orang	79.820.600	137 Orang	64.636.000	N/A	-	N/A	N/A	-	272 Orang	144.456.600			
	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		N/A	-	N/A	-	310 Lembaga	238.624.000	350 Lembaga	145.743.950	350 Lembaga	148.658.829	1.010 Lembaga	533.026.779		
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		N/A	-	N/A	-	N/A	-	30 Orang	26.100.900	30 Orang	26.622.918	60 Orang	52.723.818		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi Kabupaten	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	N/A	90%	92.940.000	90%	9.224.100	90%	46.708.800	90%	49.636.400	90%	50.629.128	90%	249.138.428	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	N/A	N/A	-	N/A	-	2 Perangkat Pendukung	25.313.600	N/A	-	N/A	-	2 Perangkat Pendukung	25.313.600	Kepala Seksi Pengaturan	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Badan Usaha	1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		2 Dokumen	30.700.000	2 Dokumen	3.580.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	4 Dokumen	34.280.000	Kepala Seksi Pengaturan	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan		2 Dokumen	62.240.000	2 Dokumen	5.644.100	N/A	-	N/A	-	N/A	-	4 Dokumen	67.884.100		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	21.395.200	5 Dokumen	23.535.500	5 Dokumen	24.006.210	12 Dokumen	68.936.910		
	Meningkatnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi	N/A	20,00%	135.110.600	40,00%	91.846.900	60,00%	136.115.000	80,00%	86.911.000	100%	88.649.220	100%	538.632.720	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		2 Dokumen	84.593.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	84.593.000	Kepala Seksi Pengawasan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		N/A	-	50 Laporan	5.562.300	N/A	-	N/A	-	N/A	-	50 Laporan	5.562.300		
	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	1	03	11	2.02	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		N/A	-	N/A	-	100 Paket Pekerjaan	39.000.000	100 Paket Pekerjaan	16.203.000	100 Paket Pekerjaan	16.527.060	300 Paket Pekerjaan	71.730.060		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa	1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		30 Orang	50.517.600	60 Orang	86.284.600	N/A	-	N/A	-	N/A	-	90 Orang	136.802.200	Kepala Seksi Pengawasan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1	03	11	2.02	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		N/A	-	N/A	-	30 Lembaga	97.115.000	40 Lembaga	70.708.000	40 Lembaga	72.122.160	110 Lembaga	239.945.160		
Terwujudnya Penataan Ruang yang Terintegrasi dengan Seluruh Sektor Pembangunan Daerah								Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94.505%	94.512%	11.598.514.516	94.519%	1.459.128.566	94.526%	1.737.488.300	94.533%	1.675.878.100	94.540%	1.709.395.662	94.54%	18.180.405.144,21		
Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan								Ketaatan Terhadap RTRW		94.512%	11.598.514.516	94.519%	1.459.128.566	94.526%	1.737.488.300	94.533%	1.675.878.100	94.54%	1.709.395.662	94.54%	18.180.405.144,21	Kepala Dinas	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	N/A	100%	393.325.933	100%	956.707.266	100%	514.707.200	100%	452.207.000	100%	461.251.140	100%	2.778.198.539	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Bangunan yang memiliki Persetujuan dokumen teknis Bangunan Gedung	1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	N/A	8,19%	393.325.933	8,25%	956.707.266	8,30%	514.707.200	8,36%	452.207.000	8,41%	461.251.140	8,41%	2.778.198.539	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Kabupaten Banjar
	Tersusunnya Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	58.562.466	2 Dokumen	40.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	4 Dokumen	98.562.466	Kepala Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.800.000	4 Dokumen	120.800.000		
	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		100 Dokumen	334.763.467	127 Dokumen	916.707.266	N/A	-	N/A	-	N/A	-	227 Dokumen	1.251.470.733	Kepala Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		N/A	-	N/A	-	150 Dokumen	474.707.200	150 Dokumen	412.207.000	150 Dokumen	420.451.140	450 Dokumen	1.307.365.340		Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	92,15%	92,16%	442.621.400	92,17%	502.421.300	92,18%	1.222.781.100	92,19%	1.223.671.100	92,20%	1.248.144.522	92,20%	4.639.639.422	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	N/A	40,00%	330.110.849	60,00%	406.449.800	80,00%	1.126.809.80	100,00%	1.127.699.800	100%	1.150.253.796	100%	4.141.324.045	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang Selain RTRW Kabupaten/Kota	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada Selain RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	106.649.800	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	166.649.800	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		N/A	-	N/A	-	1 Dokumen	898.969.800	3 Dokumen	898.969.800	3 Dokumen	916.949.196	7 Dokumen	2.714.888.796		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		1	Dokumen	220.110.849	1	Dokumen	264.800.000	N/A	-	N/A	N/A	-	2	Dokumen	484.910.849,21			
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi dan Penyempurnaan Dokumen Hasil Evaluasi dan Masukan pada Forum Lintas Sektor dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Substansi	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		N/A	-	N/A	1	Dokumen	192.840.000	3	Dokumen	193.730.000	3	Dokumen	197.604.600	7	Dokumen	584.174.600	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	35.000.00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	85.000.000			
	Tersampainya Substansi Pengaturan Bidang Penataan Ruang kepada Pemangku Kepentingan	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		N/A	-	N/A	200 Orang	35.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	200 Orang	35.000.000			
	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang		N/A	-	N/A	N/A	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.700.000	2 Laporan	70.700.000					
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	N/A	100,00%	112.510.551	100,00%	95.971.500	100,00%	58.698.900	100,00%	58.698.900	100%	59.872.878	100%	385.752.729		Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Inventasi dan Pembangunan Daerah		4	21.559.871	4	58.699.100	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	-	8	80.258.971	Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antarpemangku Kepentingan	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		N/A	-	N/A	-	4	58.698.900	4	58.698.900	4	59.872.878	12	177.270.678			
	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		250	90.950.680	275	37.272.400	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	-	525	128.223.080	Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	N/A	100,00%	-	0,00%	-	85,00%	37.272.400	85,50%	37.272.400	86,00%	38.017.84	86%	112.562.648	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Kabupaten Banjar
	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		N/A	-	N/A	-	N/A	-	300 Dokumen	37.272.400	300 Dokumen	38.017.848	600 Dokumen	75.290.248	Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		N/A	-	N/A	-	-	300 Laporan	37.272.400	N/A	N/A	-	300 Laporan	37.272.400	Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						210042.01005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		N/A	-	N/A	-	N/A	-	4 Berita Acara	178.403.172	4 Berita Acara	181.971.235	8 Berita Acara	360.374.407,44		
	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						210042.0102	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		4 Berita Acara	67.999.900	4 Berita Acara	121.858.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	8 Berita Acara	189.857.900		
	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						210042.010002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		N/A	-	N/A	-	4 Berita Acara	128.900.000	N/A	-	N/A	-	4 Berita Acara	128.900.000	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		N/A	-	N/A	-	N/A	-	4 Berita Acara	78.900.000	4 Berita Acara	80.478.000	8 Berita Acara	159.378.000		
	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSETEE	N/A	100%	40.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.200.000	100%	80.200.000	Kepala Bidang Pertanahan	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	100%	40.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.200.000	100%	80.200.000	Kepala Bidang Pertanahan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	10.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	10.200.000	50.000.000	Kepala Seksi Kepengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	N/A	-	N/A	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.200.000	3 Dokumen	30.200.000				
	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	29,22%	108.000.000	46,67%	565.000.000	64,12%	795.025.000	N/A	-	N/A	-	64,12%	1.468.025.000			Kepala Bidang Pertanahan	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	32,34%	108.000.000	49,80%	565.000.000	67,25%	795.025.000	N/A	-	N/A	-	67,25%	1.468.025.000			Kepala Bidang Pertanahan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		34 Dokumen	108.000.000	700 Dokumen	565.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	734 Dokumen	673.000.000	Kepala Seksi Kepengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2	10	09	2.01	0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		N/A	-	N/A	-	200 Dokumen	795.025.000	N/A	-	N/A	-	200 Dokumen	795.025.000		
	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	N/A	100%	129.910.200	100%	22.910.200	100%	20.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	162.820.400	Kepala Bidang Pertanahan	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah Yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	N/A	100%	129.910.200	100%	22.910.200	100%	20.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	162.820.400	Kepala Bidang Pertanahan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		1 Laporan	29.999.800	1 Laporan	12.910.200	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Laporan	42.910.000	Kepala Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		N/A	-	N/A	1 Laporan	10.000.000	N/A	-	N/A	-	1 Laporan	10.000.000			
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota		1 Dokumen	89.910.400	1 Dokumen	10.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	99.910.400		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	N/A	-	N/A	-	1 Dokumen	10.000.000	N/A	-	N/A	-	1 Dokumen	10.000.000			
	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	N/A	N/A	-	-	N/A	-	100%	578.795.000	100%	590.370.900	100%	1.169.165.900	Kepala Bidang Pertanahan	Kabupaten Banjar	
	Meningkatnya Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	2	10	12	7.01		Fasilitasi, Inventarisasi Dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	N/A	N/A	-	-	N/A	-	100%	578.795.000	100%	590.370.900	100%	1.169.165.900	Kepala Bidang Pertanahan	Kabupaten Banjar	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	2	10	12	7.01	0001	Inventasasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah data Aset Tanah Pemerintah		N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 Laporan	578.795.000	1 Laporan	590.370.900	2 Laporan	1.169.165.900	Kepala Seksi Kepengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Kabupaten Banjar
	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	2	10	13			PROGRAM SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Aset Tanah Pemkab yang terinventarisir	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	100%	110.000.000	100%	112.200.000	100%	222.200.000	Kepala Bidang Pertanahan	Kabupaten Banjar	
	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	2	10	13	7.01		Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah Swasta dan Masyarakat	Persentase Inventarisasi Aset Tanah Pemkab dalam Satu Tahun	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	100%	110.000.000	100%	112.200.000	100%	222.200.000	Kepala Bidang Pertanahan	Kabupaten Banjar	
	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	2	10	13	7.01	0001	Survey dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survey dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah		N/A	-	/A	N	-	N/A	200 Dokumen	110.000.000	200 Dokumen	112.200.000	400 Dokumen	222.200.000	Kepala Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kualitas Dan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	83,26%	84,00%	10.258.085.883	85,00%	18.257.489.312	86,50%	15.445.511.838	87,00%	18.408.256.054	88,31%	18.776.421.175	88,31%	81.145.764.262	Kepala Dinas	Kabupaten Banjar
	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	1	03	01			10.258.085.883	82,00%	18.257.489.312	85,00%	15.445.511.838	85,05%	18.408.256.054	85,10%	18.776.421.175	85,10%	81.145.764.262	Sekretaris	Kabupaten Banjar
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	1	03	01	2.01		28.708.100	100%	18.257.489.312	100%	60.000.000	100%	90.000.000	100%	91.800.000	100%	296.795.500	Sekretaris	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	7.239.600	7 Dokumen	6.719.000	N/A	-	N/A	N/A	-	10 Dokumen	13.958.700	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kabupaten Banjar
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		N/A	-	N/A	-	7 Dokumen	50.000.000	7 Dokumen	50.000.000	7 Dokumen	51.000.000	21 Dokumen		
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4 Dokumen	7.239.600	2 Dokumen	8.784.800	N/A	-	N/A	N/A	-	6 Dokumen	16.024.400	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.200.000	6 Dokumen	25.200.000		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	14.228.900	10 Laporan	10.783.500	N/A	-	N/A	-	N/A	-	17 Laporan	25.012.400	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	-	N/A	-	10 Laporan	5.000.000	10 Laporan	10.000.000	10 Laporan	10.200.000	30 Laporan	25.200.000		
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.200.000	2 Dokumen	20.200.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1	03	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 Data	10.000.000	1 Data	10.200.000	2 Data	20.200.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi						
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD									
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	100%	7.649.847.757	100%	8.229.306.258	100%	9.114.010.824	100%	10.856.721.188	100%	11.073.855.612	100%	46.923.741.639	Sekretaris	Kabupaten Banjar	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	65 7.528.468.657	70 Orang/Bulan	N/A	-	N/A	-	N/A	-	70 Orang/Bulan	15.591.078.415				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	03	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		N/A	-	N/A	-	70 Orang/Bulan	8.927.066.324	70 Orang/Bulan	10.669.776.688	70 Orang/Bulan	10.883.172.222	70 Orang/Bulan	30.480.015.233,76	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Kabupaten Banjar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	102.000.000	12 Dokumen	150.180.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	24 Dokumen	252.180.000	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		N/A	-	N/A	-	12 Dokumen	170.100.000	12 Dokumen	170.100.000	12 Dokumen	173.502.000	36 Dokumen	513.702.000		
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	14.015.700	1 Laporan	9.538.500	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Laporan	23.554.200	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		N/A	-	N/A	-	1 Laporan	9.538.500	1 Laporan	9.538.500	1 Laporan	9.729.270	3 Laporan	28.806.270		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		16 Laporan	3.530.900	16 Laporan	3.280.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	32 Laporan	6.810.900	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	N/A	-	N/A	-	16 Laporan	3.608.000	16 Laporan	3.608.000	16 Laporan	3.680.160	48 Laporan	10.896.160		Kabupaten Banjar
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.832.500	1 Dokumen	3.698.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Dokumen	5.530.500		Kabupaten Banjar
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	-	N/A	-	1 Dokumen	3.698.000	1 Dokumen	3.698.000	1 Dokumen	3.771.960	3 Dokumen	11.167.960	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	100%	4.000.000	0%		100%	17.200.000	100%	17.200.000	100%	17.544.000	100%	55.944.000	Sekretaris	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	4.000.000	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		1 Laporan	4.000.000	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Kabupaten Banjar	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		N/A		N/A		4 Laporan	17.200.000	4 Laporan	17.200.000	4 Laporan	17.544.000	12 Laporan			51.944.000
	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100%	100%	50.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	71.400.000	100%	281.400.000	Sekretaris	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang	50.000.000	10 Orang	40.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A			20 Orang	90.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		N/A		N/A		14 Orang	50.000.000	14 Orang	70.000.000	14 Orang	71.400.000	42 Orang	191.400.000		
	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100%	889.016.491	100%	5.229.827.800	100%	1.409.742.900	100%	2.198.951.900	100%	2.242.930.938	100%	11.970.470.029	Sekretaris	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	20.004.000	12 Paket	21.275.500	N/A	-	N/A	-	N/A	-	24 Paket	41.279.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		N/A	-	N/A	12 Paket	16.137.300	12 Paket	16.137.300	12 Paket	16.460.046	36 Paket	48.734.646			
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	20.000.000	12 Paket	3.637.013.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	24 Paket	3.657.013.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		N/A	-	N/A	12 Paket	221.573.600	12 Paket	347.351.600	12 Paket	354.298.632	36 Paket	923.223.832			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	185.179.800	12 Paket	165.270.500	N/A	-	N/A	N/A	-	24 Paket	350.450.300	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		N/A	-	N/A	12 Paket	126.643.500	12 Paket	176.542.500	12 Paket	180.073.350	36 Paket	483.259.350		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	74.027.469	12 Paket	31.564.800	N/A	-	N/A	N/A	-	24 Paket	105.592.269	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		N/A	-	N/A	12 Paket	44.038.500	12 Paket	47.820.500	12 Paket	48.776.910	36 Paket	140.635.910		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		48 Dokumen	50.000.000	48 Dokumen	25.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	96 Dokumen	75.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		N/A	-	N/A	72 Dokumen	67.250.000	72 Dokumen	72.000.000	72 Dokumen	73.440.000	171 Dokumen	212.690.000			
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1	03	01	2.06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	4.960.000	12 Laporan	5.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	24 Laporan	9.960.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		N/A	-	N/A	12 Laporan	14.800.000	12 Laporan	14.800.000	12 Laporan	15.096.000	36 Laporan	44.696.000			

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	534.845.222	12 Laporan	1.344.704.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	24 Laporan	1.879.549.222		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		N/A	-	12 Laporan	919.300.000	12 Laporan	1.524.300.000	12 Laporan	1.554.786.000	36 Laporan	3.998.386.000				
	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.073.741.935	100%	3.326.875.200	100%	3.445.050.014	100%	3.621.110.866	100%	3.693.533.083	100%	15.160.311.098		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	11.150.700	12 Laporan	3.675.000	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	24 Laporan	14.825.700	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		N/A	-	N/A	-	12 Laporan	21.675.000	12 Laporan	21.675.000	12 Laporan	22.108.500	36 Laporan	65.458.500		
	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	296.963.235	12 Laporan	237.900.200	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	24 Laporan	534.863.435	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		N/A	-	N/A	-	12 Laporan	220.675.014	12 Laporan	400.675.866	12 Laporan	408.689.383	36 Laporan	1.030.040.263,32		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	765.628.000	12 Laporan	3.085.300.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	24 Laporan	3.850.928.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		N/A	-	N/A	-	12 Laporan	3.202.700.000	12 Laporan	3.198.760.000	12 Laporan	3.262.735.200	36 Laporan	9.664.195.200		
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	562.771.600	100%	1.405.192.654	100%	1.349.508.100	100%	1.554.272.100	100%	1.585.357.542	100%	6.457.101.996	Sekretaris	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	41.290.000	1 Unit	34.997.424	N/A	-	N/A	N/A	-	2 Unit	76.287.424		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		N/A	-	N/A	-	1 Unit	38.990.000	1 Unit	38.990.000	39.769.800	3 Unit	117.749.800		

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		50 Unit	312.850.000	57 Unit	729.680.989	N/A	-	N/A	-	N/A	-	57 Unit	1.042.510.989		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		N/A	-	N/A	-	63 Unit	820.900.000	63 Unit	960.660.000	979.873.200	63 Unit	63 Unit	2.761.433.200	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		27 Unit	79.271.600	27 Unit	74.220.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Unit	153.491.60	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		N/A	-	N/A	-	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	102.000.000	10 Unit	302.000.000		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara		115 Unit	124.360.000	115 Unit	120.927.763	N/A	-	N/A	-	N/A	-	115 Unit	245.287.763	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara		N/A	-	N/A	-	159 Unit	114.295.000	159 Unit	114.295.000	159 Unit	116.580.900	159 Unit	345.170.900		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	5.000.000	2 Unit	445.386.478	N/A	-	N/A	-	N/A	-	2 Unit	450.386.478	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Banjar
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		N/A	-	N/A	-	2 Unit	275.323.100	2 Unit	340.327.100	2 Unit	347.133.642	2 Unit	962.783.842		

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanahan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Persentase Prasarana Konektifitas;
2. Indeks Jaringan Infrastruktur;
3. Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi;
4. Ketaatan Terhadap RTRW;
5. Indeks Kepuasan Masyarakat.



DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANJAR

1. Meningkatnya Konektivitas Kabupaten

Meningkatnya konektivitas kabupaten diukur dengan indikator, yaitu:

a. Indikator Persentase Prasarana Konektivitas

Formulasi Perhitungan

Indeks Prasarana Konektivitas =

$$\frac{\text{Panjang Jalan yang terhubung dengan pusat – pusat kegiatan dan Pusat} \\ \Sigma \text{ Produksi} + \text{Panjang Pembangunan Jalan yang Mehubungkan Pusat –} \\ \text{Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi}}{\Sigma \text{ Panjang Jalan Kabupaten dan Poros Desa}} \times 100 \%$$

- Pembilang:
Jumlah panjang jalan yang terhubung dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi ditambah dengan panjang pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi.
- Penyebut:
Jumlah panjang jalan kabupaen dan poros desa.
- Ukuran konstanta adalah persen (%)

Prasarana Konektivitas berupa jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi.

2. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Indeks Jaringan Infrastruktur

Jaringan Infrastruktur berupa fasilitas fisik untuk kepentingan umum seperti sarana pengairan, drainase, jalan, bangunan gedung, dan fasilitas fisik lainnya yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia. Indeks jaringan infrastruktur dihitung dengan persentase jumlah pembobotan yakni : 1) Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase (**8,70%**); 2) Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak (**25%**); 3) Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah (**20%**); 4) Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap (**30%**); 5) Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (**6,40%**); 6) Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang

Memadai (**4,30%**); 7) Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan (**5,60%**).

1) Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase :

$$\text{Formulasi Perhitungan} = \frac{\sum \text{Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Perkotaan Martapura}}{\sum \text{Penduduk Kecamatan Martapura}} \times 100 \%$$

- Pembilang
Jumlah penduduk yang terlayani sistem drainase perkotaan Martapura
- Penyebut
Jumlah penduduk Kecamatan Martapura
- Konstanta adalah persen (%)

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase kawasan perkotaan Martapura sehingga tidak terjadi genangan tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya (perkotaan Martapura) dari panjang drainase terbangun mencakup luasan dari jiwa penduduk yang terlayani. Jumlah penduduk yang terlayani drainase perkotaan didapat dari total panjang drainase dibagi panjang rumah (standart_10 meter) per unit yang didalam rumahnya ada 5 jiwa. Jumlah penduduk perkotaan Martapura mengacu pada data Kabupaten Banjar dalam angka BPS tahun 2021 dengan jumlah penduduk 118.860 jiwa.

2) Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman:

$$\text{Formulasi Perhitungan} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum}}{\sum \text{Rumah Tangga Kab. Banjar}} \times 100 \%$$

- Pembilang
Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum
- Penyebut
Jumlah rumah tangga Kabupaten Banjar
- Konstanta adalah persen (%)

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman merupakan persentase rumah tangga yang terlayani air minum terhadap jumlah rumah tangga Kabupaten Banjar. Jumlah rumah tangga yang

terlayani air minum adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman. Akses minum yang aman adalah memenuhi standar kualitas, fisik dan kimia (Fl dan Ar) dan Biologi Air Minum (bebas E. Coli). Jumlah rumah tangga Kabupaten banjar menggunakan basis data dari Disdukcapil Kabupaten Banjar.

3) Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah:

Formulasi Perhitungan =

$$\frac{\sum \text{Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Limbah Layak}}{\sum \text{Rumah Tangga Kab. Banjar}} \times 100 \%$$

- Pembilang
Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air limbah layak
- Penyebut
Jumlah rumah tangga Kabupaten Banjar
- Konstanta adalah persen (%)

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air limbah dibagi dengan jumlah penduduk Kab. Banjar dikali 100%. Air Limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Jumlah Rumah Tangga Kabupaten banjar menggunakan basis data dari BPS.

4) Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap:

$$\text{Formulasi Perhitungan} = \frac{\sum \text{Panjang Jalan Desa dengan Kondisi Mantap}}{\sum \text{Panjang Jalan Desa}} \times 100 \%$$

- Pembilang
Jumlah panjang jalan desa dengan kondisi mantap
- Penyebut
Jumlah panjang jalan desa
- Konstanta adalah persen (%)

Persentase jumlah panjang jalan desa dengan kondisi mantap terhadap jumlah panjang jalan desa. Jalan poros desa dengan kondisi mantap adalah jalan poros desa dalam kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana. Total panjang jalan desa 1.116 km.

5) Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik;

Formulasi Perhitungan =

$$\frac{\sum \text{Panjang Jaringan Irigasi primer dan sekunder Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik}}{\sum \text{Panjang Irigasi primer dan sekunder Kewenangan Kabupaten}} \times 100 \%$$

- Pembilang
Jumlah panjang jaringan irigasi primer dan sekunder kewenangan kabupaten dalam kondisi baik
- Penyebut
Jumlah panjang irigasi primer dan sekunder kewenangan kabupaten
- Konstanta adalah persen (%)

Jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah jaringan irigasi primer dan sekunder yang dapat mengairi areal pertanian. Jaringan irigasi merupakan Jaringan Irigasi Permukaan (DI) : 8.720 m dan Jaringan Irigasi Rawa (DIR) : 557.116 m yang merupakan kewenangan kabupaten Banjar (menurut Permen PU Nomor 14/PRT/M/2015). Total DI/DIR menjadi 565.836 m.

6) Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai

$$\text{Total capaian pertahun} = \frac{\text{Akumulasi luas kawasan yang ditangani}}{\text{Total luas kawasan strategis}} \times 100\%$$

- Pembilang
Jumlah akumulasi luas kawasan yang ditangani
- Penyebut
Total luas kawasan strategis
- Konstanta adalah persen (%)

Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai dihitung dengan membagikan akumulasi luas kawasan yang ditangani terhadap total luas kawasan strategis dikali 100%. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2021, Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

7) Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan

Formulasi Perhitungan =

$$\frac{\sum \text{Luas Kawasan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis yang tertangani}}{\sum \text{Jumlah Kawasan Strategis}} \times 100 \%$$

- Pembilang
Jumlah luas kawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis yang tertangani
- Penyebut
Jumlah kawasan strategis
- Konstanta adalah persen (%)

Kegiatan yang diperlukan sebagai upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan lingkungan binaan baik perkotaan maupun pedesaan khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya.

b. Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi

Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi merupakan persentase total perusahaan atau penyedia jasa yang aktif terhadap total perusahaan di Kabupaten Banjar.

Formulasi Perhitungan = $\frac{\sum \text{Total Perusahaan atau Penyedia Jasa yang Aktif}}{\sum \text{Perusahaan di Kab. Banjar}} \times 100 \%$

- Pembilang
Jumlah total perusahaan atau penyedia jasa yang aktif.
- Penyebut
Jumlah perusahaan di Kabupaten Banjar.
- Ukuran konstanta adalah persen (%)

Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan jumlah persentase jumlah tenaga terampil bersertifikat terhadap jumlah tenaga terampil bersertifikat dalam 5 Tahun.

3. Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan

Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan diukur dengan indikator, yaitu :

a. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW berarti bahwa pembangunan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Ketaatan terhadap RTRW dihitung dengan persentase pembobotan, yakni: 1) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (**70%**) dan 2) Persentase Aset Tanah Pemkab yang Terinventarisir dan Dipatenkan (**30%**).

1) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang :

Formulasi Perhitungan

Persentase ketaatan terhadap RTRW =

$$\frac{\sum \text{Luas Lahan Sesuai Peruntukannya}}{\sum \text{Luas Lahan Kabupaten}} \times 100 \%$$

- Pembilang:
Jumlah Luas lahan sesuai peruntukannya
- Penyebut:
Jumlah luas lahan kabupaten.
- Ukuran konstanta adalah persen (%)

2) Persentase Aset Tanah Pemkab yang Terinventarisir dan Dipatenkan :

Formulasi Perhitungan =

$$\frac{\sum \text{jumlah aset pemkab yang diinventarisir}}{\sum \text{Target inventarisasi aset pemkab dalam satu tahun}} \times 100 \%$$

- Pembilang
Jumlah aset pemerintah kabupaten yang diinventarisir
- Penyebut
Jumlah target inventarisasi aset tanah pemerintah kabupaten dalam satu tahun
- Konstanta adalah persen (%)

4. Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik

Reformasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Nilai IKM didapat dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara periodik. Survei kepuasan masyarakat

Unit penyelenggara pelayanan publik memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana Pelayanan
- 8) Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan Pelayanan
- 9) Sarana dan prasarana.

Formulasi Perhitungan

Indeks Kepuasan Masyarakat =

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\sum \text{Bobot}}{\sum \text{Unsur}} \times 100 \%$$

$$\text{IKM} = \frac{\sum \text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{Nilai Interval Konversi IKM} = \text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$



B A B

Perubahan Rencana Strategis

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII.I INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dokumen RPJMD menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dan didukung oleh seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Banjar. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Tahap awal dari penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 adalah menyusun Rancangan RPJMD dengan menganalisis capaian kinerja pembangunan, merumuskan isu strategis, dan menyusun skenario pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang termasuk penyusunan perkiraan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan analisis kerangka ekonomi dan investasi daerah. Rancangan semakin penting karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Beberapa kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan provinsi maupun nasional.

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar 2021 - 2026 juga dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Oleh sebab itu, penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar 2021 - 2026 disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta berbagai kebijakan nasional lainnya yang berkaitan dengan komitmen internasional seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sebagai salah satu keharusan yang wajib dilakukan adalah menetapkan berbagai indikator yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan melalui berbagai program yang menjadi kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan jajaran Pemerintah di Kabupaten Banjar.

Setiap Misi Pembangunan Daerah akan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran hingga program dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi kewajiban jajaran pelaksana pemerintahan untuk mencapainya melalui beberapa upaya penyelenggaraan program disertai dengan pendanaan masing-masing.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026 berada dalam misi kedua, ketiga dan keempat. Misi Kedua yakni “Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan”. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang terdapat dalam Misi kedua adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas; dan
2. Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran;

Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan;
3. Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital;
4. Menurunnya Angka Pengangguran;
5. Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM;
6. Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
7. Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial;
8. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan;
9. Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga; dan
10. Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dari 10 (sepuluh) sasaran tersebut diatas, sasaran yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, yaitu: “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas kabupaten”.

Misi Ketiga yakni “Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang terdapat dalam misi tiga adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran :

1. Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah;
2. Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni;
3. Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan; dan
4. Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup.

Dari 4 (empat) sasaran tersebut di atas, sasaran yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, yaitu: “Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan”.

Misi keempat, yakni Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang terdapat dalam misi keempat adalah terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif.

Sasaran :

1. Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik;
3. Terselenggaranya reformasi dalam system perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja;
4. Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
5. Berkembangnya professional ASN; dan
6. Berkembangnya system pemerintahan berbasis elektronik.

Dari 6 (enam) sasaran tersebut di atas, sasaran yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, yaitu: “Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Misi 2 : Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan								
Tujuan : 1. Terwujudnya Ekonomi Berbasis Kerakyatan Yang Dapat Mendorong Kemandirian, Produktif, Berdaya Saing Dan Kokoh Dengan Pertumbuhan Yang Inklusif Dan Berkualitas								
Sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi								
1	Indeks Konektifitas	65,53%	68,28%	72,70%	75,46%	78,21%	80,96%	80,96%
	Persentase Prasarana Konektivitas	98,73%	98,73%	98,73%	98,73%	98,73%	98,73%	98,73%
	- Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	71,44%	72,14%	72,84%	73,54%	74,24%	74,94%	74,94%
Misi 2 : Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan								
Tujuan : 2. Terwujudnya Penurunan Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Angka Pengangguran								
Sasaran: 7. Berkembangnya Potensi Ekonomi Yang Didukung Peningkatan Dan Pemantapan Infrastruktur, Serta Infrastruktur Lainnya Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah								
2	Indeks Infrastruktur	73,09%	73,25%	74,74%	76,14%	77,41%	78,82%	78,82%
	Indeks Jaringan Infrastruktur	73,09%	73,25%	77,56%	86,10%	79,34%	80,19%	80,19%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	- Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	46,97%	45,98%	46,20%	46,41%	46,62%	48,26%	48,26%
	- Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	N/A	37,87%	38,54%	39,20%	39,87%	64,47%	64,47%
	- Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	79,52%	80,57%	81,61%	82,64%	83,66%	84,67%	84,67%
	- Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	61,57%	76,74%	79,68%	82,27%	84,38%	86,49%	86,49%
	- Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastuktur yang Memadai	N/A	83,41%	84,57%	85,54%	86,52%	87,58%	87,58%
	- Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	100%	78%	81%	84%	87%	90%	90%
	- Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	71,95%	72,27%	73,47%	74,67%	75,87%	77,07%	77,07%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
3	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	84,00%	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	89,00%	89,00%
	- Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	85,90%	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	89,00%	89,00%
Misi 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan								
Tujuan : 1. Terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan								
Sasaran: 1. Terwujudnya Penataan Ruang yang Terintegrasi dengan seluruh Sektor Pembangunan Daerah								
4.	Persentase Kepatuhan Terhadap Rencana Tata Ruang	94,505%	94,512%	94,519%	94,526%	94,533%	94,54%	94,54%
	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	92,15%	92,16%	92,17%	92,18%	92,19%	92,20%	92,20%
	- Persentase Pemanfaatan Bangunan terhadap Rencana Tata Ruang	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	- Persentase Ijin yang Dikeluarkan sesuai dengan Tata Ruang		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati		29,22%	46,67%	64,12	-	-	64,12%
	- Persentase Aset Tanah Pemkab yang Terinventarisir dan Dipatenkan		100%	100%	100%	-	-	100%
	- Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi		-	-	-	100%	100%	100%
	- Persentase Aset Tanah Pemkab yang terinventarisir		-	-	-	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
Misi 4 : Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif								
Tujuan : 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif								
Sasaran: 2. Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik								
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,26%	84,00%	85,00%	86,50%	87,00%	88,31%	88,31%
	- Persentasi Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	73,00%	74,00%	76,00%	78,00%	80,00%	80,00%

B A B

Perubahan Rencana Strategis

8

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar disusun sebagai wujud dukungan sistem Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar dan Masyarakat) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas keberhasilan/kegagalan dilaksanakan visi dan misi.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Banjar umumnya dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Dengan dirumuskan rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar telah memberikan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang, khususnya 5 (lima) tahun kedepan dengan perumusan rencana strategis, perubahan yang akan dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut.

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya Renstra perlu dikaji secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka akan diambil upaya-upaya sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun sistem Pengukuran Kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian data kinerja.
2. Memantau dan menyesuaikan secara terus-menerus keselarasan kinerja antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dengan Propeda maupun renstra Kabupaten, sehingga

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah Kabupaten Banjar.

3. Melakukan komunikasi tentang Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, komunikasi juga perlu dilakukan pada Stakeholders (Pengguna Informasi), sehingga tercipta sistem umpan balik, dalam arti pelayanan prima yang diberikan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan serta administrasi umum benar-benar bermanfaat bagi pengguna administrasi.
4. Melakukan pengembangan perencanaan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.



Tabel 8.1

Matrik Pedoman Transisi Rencana Strategi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya konektivitas kabupaten	Persentase Prasarana Konektivitas	98,85 %
Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kabupaten	Indeks Jaringan Infrastruktur	86,10 %
Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur, serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kabupaten	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	88,00 %
Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah	Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,526 %
Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50 %

